**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

**BAB I PENDAHULUAN 1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Permasalahan 3

C. Metode 4

D. Tujuan dan Kegunaan 4

E. Out put 5

F. Sistematika Laporan 5

G. Keanggotaan Tim 6

**BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris 8**

A. Kajian Teoritis 8

B. Kajian Terhadap Norma 30

C. Kajian penerapan norma 30

D. Kajian terhadap implikasi terhadap keuangan negara 34

**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-**   
**UNDANGAN TERKAIT**

A. Evaluasi UU No.1 Tahun 1973 36 B. Konvensi Hukum Laut Internasional 40 C. Peraturan Perundang-undangan Nasional 47

1

**BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 51**

A. Landasan Filosofis 51

B. Landasan Yuridis 51

C. Landasan Sosiologis 53

**BAB V Jangkauan dan Ruang Lingkup Pengaturan 55**

A. Sasaran 55

B. Jangkauan 55

C. Ruang Lingkup Pengaturan 55

**BAB VI PENUTUP 60**

A. Simpulan 60

B. Saran/Rekomendasi 61

**LAMPIRAN** : Draft Awal RUU Perubahan UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas   
Kontinen

2

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia, memiliki luas perairan kurang lebih dua pertiga dari seluruh wilayah nasionalnya. Luas total Perairan Indonesia adalah 5,8 juta km persegi, dengan perincian sebagai berikut : Laut Wilayah seluas 0,3 juta km persegi; Perairan Kepulauan seluas 2,8 km persegi; dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 km persegi. Selain dari itu, Kepulauan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di antara benua Asia dan Australia serta diapit dan diapit oleh Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Selain memiliki wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan potensi serta keragaman sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Sedangkan karena posisnya yang strategis, Kepulauan Indonesia telah menjadi daerah perlintasan pelayaran yang sangat penting untuk menghubungkan kegiatan ekonomi antar negara di berbagai bagian dunia. Selain daripada itu potensi kekayaan minyak dan gas bumi yang terdapat di dasar laut dan tanah dibawahnya di sekeliling kepulauan baru sebagian saja yang telah dieksplorasi dan dieksploitasi. Kondisi sebagaimana terurai di atas merupakan akibat dari pengakuan internasional atas status Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Pengakuan status sebagai negara kepulauan telah tercantum di dalam Bagian IV dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on the Law of The*  *Sea;*  *UNCLOS,*  *1982*). Konvensi PBB tentang Hukum Laut internasional ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional. Dengan demikian, kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksi Republik Indonesia atas ruang perairan serta segala kekayaan alam yang terdapat di permukaan laut dan udara diatasnya, di dalam kolom air serta di dasar laut dan tanah dibawahnya telah diakui oleh Hukum Internasional. Oleh karena itu terbuka peluang seluas-luasnya untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tindakan hukum dalam bentuk ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 1982 ternyata belum didukung dengan upaya signifikan di bidang lainnya untuk melindungi wilayah laut nasional beserta potensi kekayaan alamnya yang sangat besar. Dalam hal ini masih diperlukan pengembangan hukum nasional guna mendukung eksistensi Republik

3

Indonesia di wilayah laut. Pengembangan hukum nasional dalam hal ini meliputi materi hukum, struktur hukum, budaya hukum serta sarana dan prasarana penaatan dan penegakan hukumnya. Pengembangan materi hukum merupakan proses yang berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan hukum nasional juga harus sejalan dengan perubahan tata hubungan antar negara dalam forum internasional. Perubahan tata hubungan antar negara ditandai dengan lahirnya berbagai kesepakatan baru melalui berbagai bentuk perubahan aturan dalam lingkup bilateral, regional, maupun internasional. Pada tataran nasional perubahan materi pengaturan perundang-undangan di bidang kelautan juga diperlukan agar sesuai dengan perkembangan baru yang diperkenalkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Salah satu undang-undang bidang kelautan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan baru di dalam Konvensi Hukum Laut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Dengan kata lain, Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia lahir 21 tahun sebelum Konvensi PBB tentang Hukum Laut berlaku secara resmi pada tahun 1994.

Walaupun demikian, sepanjang menyangkut hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam dasar laut khususnya minyak dan gas bumi, Undang-Undang Landas Kontinen telah dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut1982, Undang-Undang ZEE telah menetapkan hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati sampai sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Dengan demikian secara yuridis pemanfaatan segala kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah dibawahnya secara yuridis telah mempunyai landasan hukum pada dua undang-undang sekaligus, yaitu: Undang-Undang Landas Kontinen dan Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif.

Sementara itu, Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan berbagai kriteria sebagai alternatif penetapan batas terluar landas kontinen yang dapat diklaim oleh negara pantai. Berdasarkan ketentuan Pasal 76, setiap negara pantai dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan, apakah akan menggunakan kriteria horizontal atau jarak dari dari garis pangkal; kriteria vertical atau kedalaman laut dan kriteria ketebalan sedimen dasar laut sebagai bukti adanya keterkaitan alamiah dengan daratan (*natural prolongation*). Apapun kriteria yang dipilih, negara pantai tidak diperbolehkan untuk mengklaim landas kontinen lebih dari 350 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayahnya. Ketentuan ini dapat digunakan untuk membuka peluang bagi setiap negara

4

pantai, termasuk Indonesia, untuk menetapkan landas kontinen lebih dari 200 mil laut. Peluang untuk penetapan landas kontinen lebih dari 200 mil laut akan sangat terbuka apabila Indonesia mampu mengajukan argumen yang didasari oleh bukti-bukti ilmiah yang tidak disanggah oleh negara lain dan dapat meyakinkan Sekretariat Jenderal PBB. Oleh karena itu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen hanya dapat dilakukan apabila ditunjang oleh bukti-bukti ilmiah. Dalam hal ini Indonesia telah melakukan penelitian ilmiah tentang kondisi dasar laut yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait untuk mendukung klaim Indonesia terhadap landas kontinen di luar 200 mil dari garis pangkal kepulauan, khususnya di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Hasil-hasil penelitian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya hukum setingkat undang-undang sebagai justifikasinya. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1973 yang masih didasarkan pada Konvensi Jenewa Tahun 1958 perlu segera diubah dan disesuaikan dengan perkembangan baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya yang berkaitan dengan penetapan batas terluar landas kontinen menuntut dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan nasional dengan segera. Untuk itu diperlukan adanya justifikasi ilmiah dalam bentuk naskah akademik rancangan undang-undang untuk mengubah ketentuan mengenai landas kontinen Indonesia.

**B. Permasalahan**

Dari uraian di atas, permasalahan yang dihadapi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Apakah urgensi dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang   
Landas Kontinen ?

2. Bukti-bukti ilmiah apasajakah yang seharusnya disiapkan untuk mendukung argumen   
Republik Indonesia dalam pengajuan klaim atas landas kontinen lebih dari 200 mil   
diukur dari garis pangkal kepulauan

3. Ketentuan manasajakah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang perlu diubah   
dan disesuaikan dengan ketentuan tentang landas kontinen menurut Konvensi Hukum

5

Laut 1982 ? dan Ketentuan apasajakah yang perlu ditambahkan kedalam perubahan   
terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen ?

4. Peraturan perundang-undangan manasajakah yang akan terkena dampak dan perlu   
disesuaikan dengan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973   
tentang Landas Kontinen ?.

5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan serta ruang lingkup   
pengaturan ?

**C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini adalah :

1. Merumuskan urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang   
Landas Kontinen

2. Memberikan bukti-bukti ilmiah untuk mendukung argumen Republik Indonesia dalam   
pengajuan klaim atas landas kontinen lebih dari 200 mil diukur dari garis pangkal   
lurus kepulauan

3. Memberikan rumusan mengenai ketentuan apa saja yang perlu ditambahkan dalam   
perubahan/penggantian UU No.1 Tahun 1973

4. Merumuskan peraturan perundang-undangan terkait

5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan serta ruang lingkup   
pengaturan.

Kegunaan naskah akademik ini adalah sebagai bahan acuan atau referensi penyusunan RUU Perubahan/Penggantian Undang-Undang No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen.

D. **Metodologi**

Penyusunan naskah akademik dilakukan melalui pendekatan multidisipliner dengan melibatkan berbagai bidang ilmu yang terkait dengan permasalahan landas kontinen. Pembahasan semua bidang ilmu yang terkait diarahkan pada ketentuan normatif yang

6

mengatur rezim hukum landas kontinen sebagaimana telah dirumuskan didalam Bab VI Konvensi Hukum Laut 1982. Untuk itu metode penelitian normatif dilakukan melalui studi perbandingan antara setiap pasal yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 dan pasal-pasal di dalam Bab VI Konvensi Hukum Laut 1982. Melalui studi perbandingan ini diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan serta perubahan yang perlu dilakukan agar dapat mengakomodasikan perubahan-perubahan yang terjadi selama empat dekade sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973.

Hasil-hasil penelitian tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan landas kontinen Indonesia yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian, seperti : LIPI, DISHIDROS-TNI AL, BAKOSURTANAL dan lain-lain, disajikan untuk mendukung justifikasi perluasan landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut. Peraturan perundang-undangan yang terkait akan diteliti konsistensinya dengan perubahan tatacara penentuan batas landas kontinen, seperti : Undang-Undang Migas dan undang-undang terkait lainnya.

**E. Output**

Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Perubahan/Penggantian Landas Kontinen Indonesia.

**F. Sistematika Laporan**

Secara garis besar sistematika penulisan naskah akademik ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M-HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan. Adapun Laporan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Permasalahan

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

D. Metodologi

7

E. Output

F. Sistimatika laporan

G. Keanggotaan Tim

Bab II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian teoritis

B. Kajian terhadap prinsip-prinsip penyusunan norma hukum

C. Kajian terhadap implementasi serta permasalahan yang dihadapi

D. Kajian terhadap implikasi penerapan norma hukum terhadap pemangku   
kepentingan dan beban keuangan negara

Bab III: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT

Bab IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Bab V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

Bab VI: PENUTUP

Daftar Pustaka

Lampiran:

Draft Awal Rancangan Undang-Undang Perubahan/Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

8

**G. Keanggotaan Tim**

Ketua : Suparman A.Diraputra, SH.,LL.M (Fak.Hukum UNPAD)

Sekretaris : Edi Suprapto, SH.,MH. (BPHN)

Anggota :1 .Dr.Ir. Parluhutan Manurung (Bakosurtanal)

2. Letkol Laut (P) Dwi Santosa, M.Si.( Dishidros-AL)

3. Ave Maria Sihombing,SH.,MH. (Ditjen AHU)

4. Muhamad Taufan,SH. (Kementerian Luar Negeri)

5. Haryani, SH. (BPHN)

6. Rahendrojati,SH.,M.Si (BPHN).

7. Melok Karyandani, SH.. (BPHN)

Asisten :

1. Drs.Muchlas

2. Bachrudin Zuhri

9

**BAB II**

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

**A. Kajian Teoritis**

**1. Perkembangan Rejim Landas Kontinen**

Sudah sejak tahun 1918 orang mulai melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di perairan dekat pantai, khususnya di Teluk Meksiko di luar batas 3 mil laut dari Laut Wilayah. Pada waktu itu kegiatan tersebut masih didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan laut lepas. Barulah pada awal decade 1940-an, status yuridis Landas Kontinen mulai muncul, antara lain karena usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak di Teluk Paria antara Venezuela dan Trinidad yang kemudian dirumuskan menjadi suatu persetujuan perbatasan Landas Kontinen antara Inggris (yang pada waktu itu menguasai Trinidad) dan Venezuela tahun 1942. Dalam bulan September 1945, untuk pertama kalinya Presiden Harry S. Truman mengklaim kewenangan AS atas seluruh kekayaan alam di Landas Kontinen (*continental shelf*) AS, yang pada waktu itu masih diartikan sampai kedalaman air kira-kira 200 m. Setelah itu, bermunculanlah klaim berbagai-bagai Negara yang mengikuti model AS tersebut.

Masalah Landas Kontinen ini juga menonjol dalam Konferensi Hukum Laut PBB yang pertama dalam tahun 1958 yang menghasilkan Konvensi PBB pertama mengenai Landas Kontinen dan yang memberikan hak-hak berdaulat dan wewenang kepada negara pantai untuk menguasai kekayaan alam di Landas Kontinen, baik di permukaan dasar lautnya maupun didalam tanah dibawahnya sampai kedalaman air 200 meter atau sampai kedalaman air masih memungkinkan eksploitasi kekayaan alamnya.

Menjelang pertengahan dasawarsa 1960-an, definisi Konvensi PBB 1958 tersebut cepat menjadi usang, terutama karena tidak jelasnya definisi kedalaman air yang masih memungkinkan eksploitasi kekayaan alamnya, yang menjelang tahun 1965, terutama karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dibuktikan oleh ekspedisi Glomar Challenger, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam tersebut dapat dilakukan sampai kedalaman air mencapai beberapa ribu meter. Apalagi menjelang akhir dekade 1960-an, semakin banyak diketahui bahwa dasar-dasar laut yang dalam banyak ditaburi oleh “*manganese nodules*” yang kaya dengan nikel, kobalt, tembaga, mangaan, emas, dan kira- kira 50 bahan mineral lainnya. Dengan tidak jelasnya batas terluar Landas Kontinen suatu negara maka menjadi tidak jelas pula siapa yang berhak atas kekayaan alam di dasar laut

10

samudera tersebut, terutama *manganese*  *nodules*. Negara industri maju pada mulanya berpendapat bahwa siapapun atau negara manapun yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memanfaatkannya sesuai dengan prinsip kebebasan lautan. Hal ini mendapat tantangan dari negara-negara berkembang dan cepat mendapat perhatian PBB yang kemudian segera menetapkan bahwa kekayaan alam diluar batas jurisdiksi nasional adalah “*common heritage of mankind*”, dan karena itu harus diurus oleh suatu Badan Internasional untuk kepentingan seluruh umat manusia. PBB kemudian segera membentuk suatu Panitia untuk mempersiapkan Konferensi Hukum Laut PBB yang ketiga yang antara lain akan membahas masalah batas terluar dari yurisdiksi nasional atau Landas Kontinen tersebut (Konferensi Hukum Laut PBB yang kedua diadakan pada tahun 1960, tetapi hanya membahas batas terluar Laut Wilayah (Territorial Sea) dan hal itupun tidak berhasil.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Geneva tentang Landas Kontinen tahun 1958 tersebut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961. Ratifikasi tersebut disertai dengan suatu reservasi bahwa yang dimaksudkan dengan laut bebas dalam Konvensi tersebut adalah bagian laut yang terletak di luar Perairan Nusantara Indonesia. PBB menolak intepretasi Indonesia ini karena menyangkut reservasi terhadap pasal-pasal yang tidak boleh dilakukan reservasi oleh Konvensi itu sendiri. Karena Konvensi itu telah diratifikasi oleh Indonesia, maka Indonesia sudah melaksanakan wewenang-wewenang atas Landas Kontinen sesuai dengan ketentuan Konvensi Geneva tahun 1958 itu. Sesuai dengan itu maka sudah sejak 1968 Indonesia membentuk Tim Teknis Landas Kontinen yang kemudian merundingkan batas- batas Landas Kontinen tersebut dengan Negara-negara tetangganya, perundingan tersebut telah menghasilkan persetujuan-persetujuan dengan India, Thailand, Malaysia, PNG, dan Australia. Perundingan dengan Vietnam dan Filipina yang telah dilakukan sejak bertahun- tahun, sampai sekarang belum memperlihatkan hasil yang konkrit, kecuali dengan Vietnam. (Namun demikian, perjanjian garis batas Landas Kontinen Indonesia-Vietnam, tanggal 26 Juni 2003, kabarnya telah diratifikasi oleh Vietnam tetapi belum lagi oleh Indonesia. Demikian pula halnya dengan perjanjian garis batas ZEE dan Landas Kontinen yang terakhir dengan Australia (1997), dan Landas Kontinen Australia ada yang terletak dibawah ZEE Indonesia, juga belum diratifikasi oleh kedua negara). Sementara itu berdasarkan Konvensi Geneva 1958 Indonesia telah mengeluarkan suatu Pengumuman tentang Landas Kontinen tanggal 17 Februari 1969 dan telah menetapkan UU Landas Kontinen dengan UU nomor 1 tahun 1973, yang pada dasarnya masih didasarkan kepada Konvensi Geneva 1958 tentang Landas Kontinen yang kini sudah tidak berlaku lagi bagi Indonesia dan negara Pihak

11

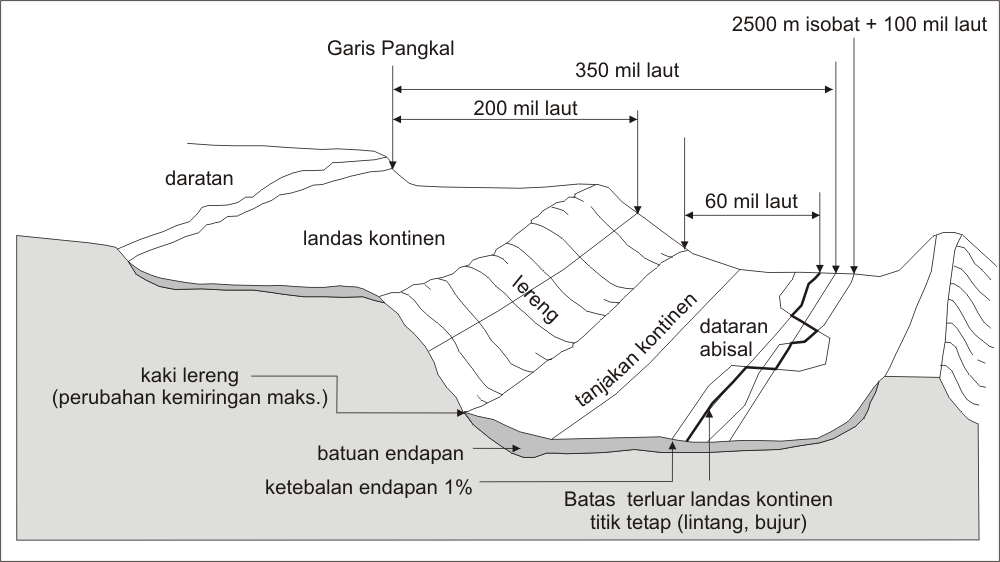
Konvensi HUKLA 1982 lainnya (lihat Pasal 311 ayat (1) Konvensi HUKLA 1982), apalagi karena ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Geneva 1958 itupun pernah ditolak oleh Sekjen PBB.

**2. Pemahaman Konsep Landas Kontinen.**

Di lingkup internasional semakin banyak negara-negara besar yang mempunyai Landas Kontinen yang besar, menuntut agar batas terluar Landas Kontinennya ditetapkan seluas mungkin, paling tidak selebar 200 mil laut ZEE, seperti AS, Kanada, Rusia, Inggris, Irlandia, Australia, Selandia Baru, Norwegia, dan lain-lain. Indonesia, walaupun Landas Kontinennya di *Sahul*  *Plate* dan Asia Tenggara telah tercakup oleh definisi Perairan Nusantara dan ZEE, namun mendukung pandangan negara-negara yang mempunyai Landas Kontinen yang luas ini karena kemungkinan Indonesia masih mungkin mempunyai Landas Kontinen diluar 200 mil laut ZEE di Samudera Hindia dan Pasifik. Dalam hubungan ini, perlu dicatat bahwa sementara itu telah berkembang pula pengertian yang berbeda antara “*Continental*  *Shelf*” dalam pengertian geologis dikenal sebagai paparan benua, dan “*continental shelf*” dalam pengertian yuridis disebut dengan Landas Kontinen.

*Continental*  *Shelf* dalam pengertian geologis adalah daerah dasar laut mulai dari   
pantai yang merupakan “dataran/paparan/dangkalan” yang meluas hingga kemudian dataran   
tersebut berubah secara drastis menjadi lebih “terjal”. Dataran tersebut pada umumnya   
terletak pada kedalaman laut antara 135 meter sampai dengan 200 meter. Di luar   
“*Continental Shelf*” dalam pengertian geologis tersebut, mencakup “*continental slope*”, yaitu   
pada waktu dasar laut tersebut menjadi agak lebih “curam”; kemudian “*continental rise*”,   
yaitu pada waktu daerah dasar laut tersebut kembali lebih mendatar, sampai kepada   
pertemuan antara “*rise*” tersebut dengan “*oceanic*  *crust*” yang merupakan dasar laut   
samudera yang bukan lagi merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan/kontinen. Dari segi hukum (*legal continental shelf*), kini “*continental shelf*”, “*slope*”, dan “*rise*” dapat   
dianggap sebagai bagian dari “*continental shelf*” yang berada dibawah hak-hak berdaulat   
negara pantai, yaitu yang sering disebut sebagai “*continental margin*”, selama “*slope*” dan   
“*rise*” tersebut masih merupakan kelanjutan alamiah (natural prolongation) dari wilayah   
daratnya. Batas terluar “*continental margin*” inilah yang kini harus ditetapkan oleh Indonesia   
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 76 UNCLOS 1982.

12



Sumber: TALOS 1982 dan I Made Andi Arsana dalam arsana\_fullpaper\_final.pdf

Gambar 1. Profil Landas Kontinen

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 akhirnya menetapkan dalam Pasal 76 bahwa negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di Landas Kontinen dalam pengertian yuridis. Konvensi 1982 ini menggantikan Konvensi 1958. Dalam pengertian yuridis, Landas Kontinen (*continental shelf*) diartikan sebagai daerah dasar laut dan tanah di bawahnya dan di luar batas Laut Wilayah (jadi bukan dari pantai) sampai mencakupi seluruh kelanjutan alamiah dari wilayah darat negara yang bersangkutan sampai kepinggir terluar “*continental margin*”, termasuk “*slope*” dan “*rise*” (kriteria geologis-geomorphologis), atau sampai 200 mil laut dari garis-garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur, jika pinggir terluar dari “*continental margin*” tersebut tidak melebihi 200 mil laut dari garis-garis pangkal (kriteria “jarak” atau “*distance*”). Mengingat definisi *outer edge of the continental margin* tersebut masih belum jelas, walaupun dalam definisi itu umumnya tercakup pengertian “*continental*  *shelf*”, *“continental slope”,* dan *“continental rise”* dalam konsep geologis, maka Konvensi 1982 juga membatasi batas terluar Landas Kontinen tersebut sampai 350 mil laut dari garis-garis pangkal (*baselines*)atau 100 mil laut di luar batas kedalaman laut 2500 meter.

13

Dengan demikian dapat dijelaskan secara tegas yang dimaksud dengan Landas Kontinen dalam Pasal 76 UNCLOS, sebagai berikut:

a. Batas terluar Landas Kontinen suatu negara pantai (1) mencakup daerah dasar laut   
diluar laut wilayah termasuk seluruh kepanjangan alamiah wilayah daratnya sampai   
ke batas terluar “*continental margin*”nya, atau (2) sejauh 200 mil laut dari garis-garis   
pangkal darimana Laut Wilayah diukur, jika batas terluar dari “*continental margin*”   
tersebut tidak sampai ke 200 mil laut.

b. *Continental*  *margin* tersebut mencakup “*shelf”,*  *“slope”,*  dan *“rise*”, tapi tidak   
termasuk *deep ocean floor* dengan *oceanic ridges*-nya.

c. Negara pantai dapat menetapkan sendiri batas terluar “*continental margin*”nya di luar   
200 mil laut dari garis-garis pangkal:

1) Garis lurus yang tidak melebihi 60 mil laut yang menghubungkan titik-   
titik tertentu dimana ketebalan-ketebalan sedimentary rocks paling   
kurang 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dengan “foot of the   
continental slope”. Hal ini berarti bahwa “*foot of the slope*” harus   
diidentifikasi dan ditetapkan terlebih dahulu, kemudian ketebalan   
*sedimentary rocks* di luar slope juga harus diukur; atau

2) Garis lurus yang tidak melebihi 60 mil laut yang menghubungkan titik-   
titik yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut dari “*foot of the slope*”.   
Dalam hal ini, maka juga perlu diidentifikasi titik-titik di seluruh “*foot*   
*of the slope*” tersebut, yaitu titik-titik yang menjadi “*maximum change*   
*in the gradient at its base*”.

3) Kedua garis tersebut diatas, tidak boleh melebihi 350 mil laut dari   
garis-garis pangkal atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari   
kedalaman laut 2500 meter (isobaths 2500 meter). Dalam hal ini,   
maka perlu diidentifikasi dan ditetapkan terlebih dahulu garis   
kedalaman laut 2500 meter (isobath 2500 meter) tersebut. Dengan   
demikian, jika kedalaman laut 2500 meter jauh ke tengah laut, maka   
masih ada kemungkinan batas terluar *continental margin* tersebut dapat   
melebihi 350 mil laut, kecuali pada “*sub-marine*  *ridges*” (dengan   
catatan batas tersebut tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis-garis   
pangkal).

14

Seperti yang terlihat pada Gambar 1, garis pangkal merupakan referensi pengukuran klaim maritim. Dari sini juga diukur beberapa formula maupun syarat pembatas dalam menentukan batas terluar LKE. Penentuan LKE memerlukan data dan informasi tentang profil dasar laut, terutama posisi kaki lereng (*Foot of Slope*, FOS). Selain itu informasitentang sedimen juga sangat penting. Batas terluar LKE (Lihat Gambar 1) ditentukan dengan mengaplikasikan ketentuan kriteria formula dan syarat pembatas dengan ketentuan:

1) Batas terluar LKE didasarkan pada tempat kedudukan titik-titik tetap yang   
mendelineasi ketebalan batu endapan (*sedimentary rock*) setidaknya 1 % dari   
jarak terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng yang disebut Gardiner   
Line, atau

2) Berdasarkan jarak 60 mil dari kaki lereng yang dikenal dengan Hedberg Line.

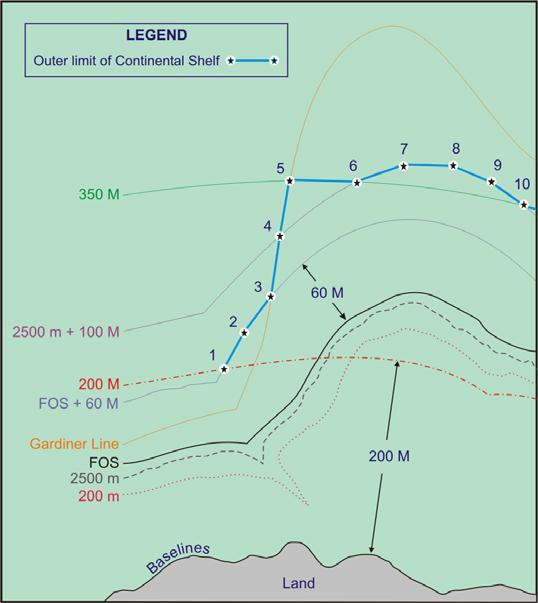
3) Batas terluar dari landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis   
pangkal, atau

4) Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter isobath.

Petunjuk teknis dan ilmiah penentuan batas terluar LKE ini ditetapkan secara resmi oleh CLCS dalam *Scientific and Technical Guidelines of the Commission on the Limits of the Continental*  *Shelf*  (CLCS, 1999). Untuk kepentingan teknis, prosedur penentuan Landas Kontinen Ekstensi ini juga dijabarkan dalam *Manual on the Technical Aspects of the United Nations Convention on the Law of the Sea* (TALOS, International Hydrographic Bureau, 2006).

Dengan menerapkan dua kriteria formula dan dua syarat pembatas, batas terluar Landas Kontinen dapat ditentukan seperti diilustrasikan dalam perspektif 2 dimensi seperti pada Gambar 2 yang menunjukkan bahwa dua garis dibuat berdasarkan kriteria ketebalan batuan endapan 1% dan 60 mil dari *foot of the slope* (FOS) untuk menentukan batas terluar landas kontinen. Batas terluar dapat merupakan kombinasi kedua garis tersebut dan hasilnya adalah yang paling menguntungkan negara pantai (terluar). Meski demikian, negara pantai harus juga mempertimbangkan syarat pembatas seperti yang dijelaskan sebelumnya. Batas terluar landas kontinen final akhirnya merupakan garis yang dibentuk oleh dua kriteria (Gardiner dan Hedberg Line) dan tidak boleh melebihi/melewati garis 350 mil dari garis pangkal atau tidak melewati garis kedalaman 2500 m isobath + 100 mil.

15



Gambar 2. Penentuan Batas Terluar Landas Kontinen

**3. Pemanfaatan di Landas Kontinen**

Apabila di dalam rezim hukum ZEE terdapat ketentuan yang memungkinkan negara-   
negara tertentu memanfaatkan surplus perikanan di ZEE melalui suatu persetujuan bilateral disebutkan dalam Pasal 62 ayat (2) UNCLOS 1982, maka di dalam Landas Kontinen tidak   
ada ketentuan mengenai pemanfaatan surplus kekayaan alam tersebut. Tetapi di dalam   
Landas Kontinen diatur ada ketentuan bagi hasil antara negara pantai dengan *International*   
*Seabed Authority (ISBA)* mengenai eksploitasi kekayaan alam yang non-hayati di Landas   
Kontinen di luar batas 200 mil laut dari garis-garis pangkal (Pasal 82 UNCLOS 1982). Pasal 82 ayat (2) menyatakan bahwa bagi hasil tersebut dengan ISBA adalah dimulai setelah   
5 tahun pertama “*production*  *at*  *the*  *site*”, yang dimulai pada tahun ke enam dengan

16

menyerahkan 1% dari hasil produksi “at the site” kepada ISBA, yang kemudian naik setiap tahun dengan 1%, sehingga menjadi tetap pada 7% setelah produksi tahun ke 12.

Perlu pula dicatat, bahwa yang dimaksud dengan kekayaan alam di Landas Kontinen termasuk “*living organisms belonging to sedentary species*”, yaitu jenis-jenis organisme atau binatang yang pada saat dipanen berada didasar laut atau tanah dibawahnya dan yang hanya dapat bergerak selama ada “*physical contact*” dengan dasar laut atau tanah dibawahnya yang disebutkan dalam Pasal 77 ayat (4) UNCLOS 1982. Dengan demikian, maka jenis-jenis kekayaan alam hayati ini tidak termasuk ke dalam rezim hukum ZEE ataupun rezim hukum Laut Bebas, tapi tunduk kepada rezim hukum Landas Kontinen yang berada di bawah hak- hak berdaulat (*sovereign rights*) negara pantai.

Sebagaimana halnya dengan di ZEE, negara-negara pantai seperti Indonesia juga berhak mengatur dan mempunyai yurisdiksi atas instalasi-instalasi, pulau-pulau buatan, dan bangunan-bangunan lainnya di Landas Kontinen. Instalasi, pulau-pulau buatan, dan bangunan-bangunan tersebut tidak dianggap sebagai pulau dan tidak memperoleh Laut Wilayah, Zona Tambahan, ZEE dan Landas Kontinen sendiri, tetapi dapat memperoleh “safety zone” selebar 500 meter disekeliling instalasi, pulau buatan, dan bangunan tersebut, yang tidak boleh dimasuki oleh kapal-kapal asing kecuali yang berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, memperkenankan lagi adanya “limited zone” selebar 1250 meter diluar “safety zone” tersebut, dimana kapal- kapal asing dilarang membuang jangkar. Konvensi Hukum Laut 1982 tidak mengenal adanya “limited zone” tersebut. Pada umumnya “limited zone” tersebut dimaksudkan untuk safety zone didalam Perairan Nusantara.

Di luar batas Landas Kontinen terdapat “*International*  *Seabed*  *Area*  *(ISA)*” yang pengelolaan kekayaan alamnya dilakukan oleh *International Seabed Authority* (ISBA) yang berkedudukan di Kingston, Jamaica. Oleh karena itu maka jika sesuatu negara mengklaim bahwa dia masih mempunyai Landas Kontinen di luar batas 200 mil laut dari garis-garis pangkalnya, maka negara tersebut haruslah menyampaikan batas terluar Landas Kontinen tersebut kepada “*Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)*” dalam waktu 10 tahun sejak berlakunya Konvensi tersebut bagi negara yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Lampiran II Konvensi HUKLA 1982. Indonesia meratifikasi Konvensi HUKLA pada tanggal 31 Desember 1985 dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 1985, sedangkan Konvensi itu sendiri baru diberlakukan, sejak tanggal 16 November

17

1994 dan sejak itu pulalah Konvensi tersebut berlaku secara resmi bagi Indonesia. *Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)* tersebut telah berdiri, dan sesuai dengan Konvensi, Indonesia akan harus mengajukan klaimnya atas Landas Kontinen diluar batas 200 mil laut dari garis-garis pangkal, jika ada, kepada Komisi tersebut menjelang 16 November 2004. Untuk itu diperlukan kegiatan survey kelautan (survey geoseismik) untuk mengetahui apakah Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 76 Konvensi HUKLA 1982, masih mempunyai “*continental margin*” di luar batas 200 mil laut tersebut. Berdasarkan data geosesismik yang terdapat di PBB, Indonesia masih mungkin melakukan klaim atas continental margin di luar 200 mil laut di sebelah barat Aceh, di sebelah selatan Sumbawa, dan di utara Papua.

Namun disayangkan, dalam perjanjian perbatasan ZEE dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Australia 1997, Indonesia sepertinya telah menyerahkan batas Landas Kontinen tersebut kepada Australia, malah juga termasuk daerah dasar laut yang berada dalam batas 200 mil laut ZEEI. Disamping itu, kabarnya PBB juga sudah memperpanjang batas waktu pengajuan klaim “*continental margin*” tersebut bagi negara-negara pantai dengan 5 tahun lagi, yaitu sampai 16 November 2009. PBB pun melalui CLCS dapat membantu negara-negara berkembang, khususnya negara pantai yang berpotensi mempunyai “*continental margin*” yang luas untuk melakukan studi guna menentukan batas-batas terluar “*continental margin*” mereka.

**4 . Tindak Lanjut Yang Mendesak**

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka hal-hal mendesak yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia, antara lain adalah :

1. Indonesia harus segera menuntaskan batas-batas Landas Kontinen dengan negara-   
negara tetangga, terutama dengan Vietnam di Laut Cina Selatan, dengan Malaysia dan   
Filipina di Laut Sulawesi, serta dengan Filipina dan Palau di Samudera Pasifik.   
Dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia, maka perbatasan laut antara kedua   
negara, khususnya di Laut Timor dan di Selat Ombai dan Selat Wetar, juga perlu   
dirundingkan dan ditetapkan dengan perjanjian. Khusus dengan perbatasan di Laut   
Timor, mungkin memerlukan”tripartite” agreement dengan Australia.

18

2. Melakukan aktifitas penelitian kelautan untuk mengetahui kemungkinan Indonesia   
masih mempunyai *continental*  *margin* di luar batas 200 mil laut, terutama di   
Samudera Hindia, dan, jika ditemukan, maka mengajukan klaim tersebut kepada   
CLCS (sebelum 16 November 2004 dan diperpanjang hingga 16 November 2009).   
Hal ini perlu untuk lebih memperjelas batas-batas antara Landas Kontinen Indonesia   
dan ISA. Jika diperlukan, Indonesia dapat meminta bantuan CLCS, baik bantuan   
teknis dan expertis ataupun juga bantuan keuangan. Hal ini perlu segera dijajaki oleh   
DEPLU.

3. Meningkatkan usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi mineral di Landas Kontinen   
Indonesia, terutama migas, termasuk *methane hydrate* dan mineral keras lainnya.

4. Memperbaharui beberapa ketentuan pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun   
1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, dan menyesuaikannya dengan ketentuan-   
ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, terutama Pasal 1 Undang-undang tersebut   
yang secara substansi masih membatasi Landas Kontinen Indonesia sampai   
kedalaman laut 200 meter. Disamping itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 juga   
menyebut 3 Peraturan Pemerintah yang harus dibuat, yaitu tentang penelitian ilmiah   
di Landas Kontinen, tentang pembangunan dan penggunaan instalasi dan alat-alat   
lainnya di Landas Kontinen, dan tentang pencegahan pencemaran laut. Ketentuan-   
ketentuan ini juga harus disesuaikan dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

5. Meneruskan pertisipasi aktif Indonesia dalam ISBA untuk mengelola kekayaan alam   
di ISA, khususnya yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan dan pemanfaatan   
kekayaan alam sejenis dalam wilayah dan yurisdiksi nasional Indonesia, terutama   
nikel, tembaga dan bahan-bahan mineral strategis lainnya.

**5. Hak Pemanfaatan di Landas Kontinen.**

Jika di dalam ZEE terdapat ketentuan yang memungkinkan negara-negara tertentu memanfaatkan surplus perikanan di ZEE melalui suatu persetujuan bilateral disebutkan dalam Pasal 62 ayat (2) UNCLOS 1982, maka di dalam Landas Kontinen tidak ada ketentuan mengenai pemanfaatan surplus kekayaan alam tersebut, namun Tetapi di dalam Landas Kontinen diatur ada ketentuan bagi hasil antara negara pantai dengan *International Seabed*

19

*Authority (ISBA)* mengenai eksploitasi kekayaan alam yang non-hayati di Landas Kontinen di luar batas 200 mil laut dari garis-garis pangkal (Pasal 82 UNCLOS 1982). Pasal 82 ayat (2) menyatakan bahwa bagi hasil tersebut dengan ISBA adalah dimulai setelah 5 tahun pertama “*production at the site*”, yang dimulai pada tahun ke enam dengan menyerahkan 1% dari hasil produksi “at the site” kepada ISBA, yang kemudian naik setiap tahun dengan 1%, sehingga menjadi tetap pada 7% setelah produksi tahun ke 12.

Perlu pula dicatat, bahwa yang dimaksud dengan kekayaan alam di Landas Kontinen termasuk “*living organisms belonging to sedentary species*”, yaitu jenis-jenis organisme atau binatang yang pada saat dipanen berada didasar laut atau tanah dibawahnya dan yang hanya bisa bergerak selama ada “*physical contact*” dengan dasar laut atau tanah dibawahnya yang disebutkan dalam Pasal 77 ayat (4) UNCLOS 1982. Dengan demikian, maka jenis-jenis kekayaan alam hayati ini tidak termasuk ke dalam rezim hukum ZEE ataupun rezim hukum Laut Bebas, tapi tunduk kepada rezim hukum Landas Kontinen yang berada di bawah hak- hak berdaulat (*sovereign rights*) negara pantai.

Sebagaimana halnya dengan di ZEE, negara-negara pantai seperti Indonesia juga berhak mengatur dan mempunyai yurisdiksi atas instalasi-instalasi, pulau-pulau buatan, dan bangunan-bangunan lainnya di Landas Kontinen. Instalasi, pulau-pulau buatan, dan bangunan-bangunan tersebut tidak dianggap sebagai pulau dan tidak memperoleh Laut Wilayah, Zona Tambahan, ZEE dan Landas Kontinen sendiri, tetapi dapat memperoleh “safety zone” selebar 500 meter disekeliling instalasi, pulau buatan, dan bangunan tersebut, yang tidak boleh dimasuki oleh kapal-kapal asing kecuali yang berkunjung ke tempat-tempat tersebut. UU RI nomor 1/1973 tentang Landas Kontinen, memperkenankan lagi adanya “limited zone” selebar 1250 meter diluar “safety zone” tersebut, dimana kapal-kapal asing dilarang membuang jangkar. Konvensi Hukum Laut 1982 tidak mengenal adanya “limited zone” tersebut. Pada umumnya “limited zone” tersebut dimaksudkan untuk safety zone didalam Perairan Nusantara.

Di luar batas Landas Kontinen terdapat “*International*  *Seabed*  *Area*  *(ISA)*” yang pengelolaan kekayaan alamnya dilakukan oleh International Seabed Authority yang berkedudukan di Kingston, Jamaica. Oleh karena itu maka jika sesuatu negara mengklaim bahwa dia masih mempunyai Landas Kontinen di luar batas 200 mil laut dari garis-garis pangkalnya, maka negara tersebut haruslah menyampaikan batas terluar Landas Kontinen tersebut kepada “*Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)*” dalam waktu 10

20

tahun sejak berlakunya Konvensi tersebut bagi negara yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Lampiran II Konvensi HUKLA 1982. Indonesia meratifikasi Konvensi HUKLA pada tanggal 31 Desember 1985 dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 1985, sedangkan Konvensi itu sendiri baru diberlakukan, sejak tanggal 16 November 1994 dan sejak itu pulalah Konvensi tersebut berlaku secara resmi bagi Indonesia. *Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)* tersebut telah berdiri, dan sesuai dengan Konvensi, Indonesia akan harus mengajukan klaimnya atas Landas Kontinen diluar batas 200 mil laut dari garis-garis pangkal, jika ada, kepada Komisi tersebut menjelang 16 November 2004. Untuk itu diperlukan kegiatan survey kelautan (survey geoseismik) untuk mengetahui apakah Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 76 Konvensi HUKLA 1982, masih mempunyai “*continental margin*” di luar batas 200 mil laut tersebut. Berdasarkan data geosesismik yang terdapat di PBB, Indonesia masih mungkin melakukan klaim atas continental margin di luar 200 mil laut di sebelah barat Aceh, di sebelah selatan Sumbawa, dan di utara Papua.

Namun disayangkan, dalam perjanjian perbatasan ZEE dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Australia 1997, Indonesia sepertinya telah menyerahkan batas Landas Kontinen tersebut kepada Australia, malah juga termasuk daerah dasar laut yang berada dalam batas 200 mil laut ZEEI. Disamping itu, kabarnya PBB juga sudah memperpanjang batas waktu pengajuan klaim “*continental margin*” tersebut bagi negara-negara pantai dengan 5 tahun lagi, yaitu sampai 16 November 2009. PBB pun melalui CLCS dapat membantu negara-negara berkembang, khususnya negara pantai yang berpotensi mempunyai “*continental margin*” yang luas untuk melakukan studi guna menentukan batas-batas terluar “*continental margin*” mereka.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka hal-hal mendesak yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia, antara lain:

a. Menuntaskan batas-batas Landas Kontinen dengan negara-negara tetangga,   
terutama dengan Vietnam di Laut Cina Selatan, dengan Malaysia dan Filipina di Laut   
Sulawesi, serta dengan Filipina dan Palau di Samudera Pasifik. Dengan lepasnya   
Timor Timur dari Indonesia, maka perbatasan laut antara kedua negara, khususnya di   
Laut Timor dan di Selat Ombai dan Selat Wetar, juga perlu dirundingkan dan   
ditetapkan dengan perjanjian. Khusus dengan perbatasan di Laut Timor, mungkin   
memerlukan”tripartite” agreement dengan Australia. Dengan Vietnam kelihatan telah

21

selesai (dengan catatan, batas ZEE masih dalam proses penyelesaian), walaupun persetujuan tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia. (secara internal, Vietnam telah meratifikasinya). Dengan Malaysia di Laut Sulawesi, pembicaraan-pembicaraan telah dimulai setelah Mahkamah Internasional memberikan putusan terhadap sengketa pulau Sipadan dan Ligitan. Dengan Filipina, baik di laut Sulawesi, maupun di perairan antara Mindanao dan Sulawesi Utara, maupun di Samudera Pasifik, belum menghasilkan kesepakatan.

b. Melakukan aktifitas penelitian kelautan untuk mengetahui kemungkinan Indonesia masih mempunyai *continental margin* di luar batas 200 mil laut, terutama di Samudera Hindia, dan, jika ditemukan, maka mengajukan klaim tersebut kepada CLCS (sebelum 16 November 2004 dan diperpanjang hingga 16 November 2009). Hal ini perlu untuk lebih memperjelas batas-batas antara Landas Kontinen Indonesia dan ISA. Jika diperlukan, Indonesia dapat meminta bantuan CLCS, baik bantuan teknis dan expertis ataupun juga bantuan keuangan. Hal ini perlu segera dijajaki oleh DEPLU.

c. Meningkatkan usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi mineral di Landas Kontinen Indonesia, terutama migas, termasuk *methane hydrate* dan mineral keras lainnya.

d. Memperbaharui beberapa ketentuan pokok dalam UURI Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, dan menyesuaikannya dengan ketentuan- ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, terutama Pasal 1 UU No. 1/1973 yang secara substansi masih membatasi Landas Kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter. Disamping itu, UU No. 1/1973 juga menyebut 3 Peraturan Pemerintah yang harus dibuat, yaitu tentang penelitian ilmiah di Landas Kontinen, tentang pembangunan dan penggunaan instalasi dan alat-alat lainnya di Landas Kontinen, dan tentang pencegahan pencemaran laut. Ketentuan-ketentuan ini juga harus disesuaikan dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

e. Meneruskan pertisipasi aktif Indonesia dalam ISBA untuk mengelola kekayaan alam di ISA, khususnya yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan dan pemanfaatan kekayaan alam sejenis dalam wilayah dan yurisdiksi nasional Indonesia, terutama nikel, tembaga dan bahan-bahan mineral strategis lainnya.

22

**6. Pengamanan data kelautan.**

Penerbitan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 (PPRI No. 41/2006) tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing Dan Orang Asing, memberikan peluang bagi orang/pihak asing untuk menjalin kerjasama penelitian kelautan dengan instansi pemerintah seperti LIPI, BPPT, Bakosurtanal, KKP, BP Migas, PPGL dan lain-lain.

Terkait dengan kegiatan penelitian kelautan di wilayah perairan yurisdiksi nasional yang mencakup luas ± 5,8 juta km2 yang termasuk di dalamnya luas ZEEI seluas ± 2,7 juta km2, sementara untuk luas Landas Kontinen masih dalam perdebatan mengingat luas Landas

Kontinen Indonesia masih dalam proses penelitian kelautan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pihak asing yang memiliki kemampuan sumber daya dan tenaga ahli yang memadai. Mengingat kegiatan eksplorasi Landas Kontinen terkait dengan kegiatan pemetaan sumber daya dasar laut dan di bawah dasar laut yang akan menghasilkan tidak hanya menggambarkan profil dasar laut saja, namun juga menggambarkan potensi sumber daya mineral yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi nasional suatu negara pantai, maka segala bentuk kegiatan survei atau penelitian kelautan termasuk Landas Kontinen yang dilakukan secara mandiri oleh suatu instansi pemerintah atau dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing, selain harus mendapat ijin dari pemerintah Indonesia di dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan pengamanan pelaksanaan kegiatannya dan pengamanan terhadap data yang diperolehnya.

Pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan, administrasi perijinan, pelaksanaan lapangan, pengolahan data dan penyajian data hingga pengarsipan data yang melibatkan peran aparat pengamanan terkait sesuai Kepmenhan RI No. Kep/09/M/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang pengamanan survei dan pemetaan wilayah nasional.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 (PPRI No. 41/2006) tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing Dan Orang Asing, hanya mengatur perizinan penelitian hukum dalam wilayah perairan Indonesia, sedangkan untuk wilayah landas kontinen tidak termasuk di dalamnya. Wilayah Landas Kontinen Indonesia berada di luar perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya

23

mempunyai hak melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap dasar laut dan bahan mineral yang berada di wilayah landas kontinen.

Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan atau penyempurnaan dari peraturan Pemerintah tersebut atau dibuat peraturan pemerintah yang baru agar dapat memberikan izin kepada para peneliti, badan hukum atau lembaga penelitian asing untuk melakukan penelitian di wilayah landas kontinen Indonesia, ZEE dan Zona Ekonomi Tambahan. Aakn tetapi tetap memperhitungkan kemanfaatan hasil penelitian tersebut bagi negara Indonesia.

**7. Pengarsipan data kelautan.**

Pengarsipan data survei kelautan (khususnya data survei Landas Kontinen) yang memiliki nilai strategis untuk mendukung kepentingan nasional, sehingga semua data hasil survei kelautan diarsipkan secara baik dan aman serta dapat digunakan (diakses) oleh instansi pemerintah, organisasi dan perorangan untuk kepentingan terbatas yang penggunaannya diatur semata-mata untuk menjaga keamanan data.

Instansi pengelola arsip data kelautan (*Marine*  *Data*  *Centre*) ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan keterpaduan fungsi dan peran masing-masing instansi yang bergiat di laut dan menempatkan perwakilan personel sebagai fungsi pengawasan terhadap aliran data yang dikelola oleh instansi pengelola arsip.

**8. Pemanfaatan di Landas Kontinen**

Apabila di dalam rezim hukum ZEE terdapat ketentuan yang memungkinkan negara-   
negara tertentu memanfaatkan surplus perikanan di ZEE melalui suatu persetujuan bilateral disebutkan dalam Pasal 62 ayat (2) UNCLOS 1982, maka di dalam Landas Kontinen tidak   
ada ketentuan mengenai pemanfaatan surplus kekayaan alam tersebut. Tetapi di dalam   
Landas Kontinen diatur ada ketentuan bagi hasil antara negara pantai dengan *International*   
*Seabed Authority (ISBA)* mengenai eksploitasi kekayaan alam yang non-hayati di Landas   
Kontinen di luar batas 200 mil laut dari garis-garis pangkal (Pasal 82 UNCLOS 1982). Pasal 82 ayat (2) menyatakan bahwa bagi hasil tersebut dengan ISBA adalah dimulai setelah   
5 tahun pertama “*production*  *at*  *the*  *site*”, yang dimulai pada tahun ke enam dengan

24

menyerahkan 1% dari hasil produksi “at the site” kepada ISBA, yang kemudian naik setiap tahun dengan 1%, sehingga menjadi tetap pada 7% setelah produksi tahun ke 12.

Perlu pula dicatat, bahwa yang dimaksud dengan kekayaan alam di Landas Kontinen termasuk “*living organisms belonging to sedentary species*”, yaitu jenis-jenis organisme atau binatang yang pada saat dipanen berada didasar laut atau tanah dibawahnya dan yang hanya dapat bergerak selama ada “*physical contact*” dengan dasar laut atau tanah dibawahnya yang disebutkan dalam Pasal 77 ayat (4) UNCLOS 1982. Dengan demikian, maka jenis-jenis kekayaan alam hayati ini tidak termasuk ke dalam rezim hukum ZEE ataupun rezim hukum Laut Bebas, tapi tunduk kepada rezim hukum Landas Kontinen yang berada di bawah hak- hak berdaulat (*sovereign rights*) negara pantai.

Sebagaimana halnya dengan di ZEE, negara-negara pantai seperti Indonesia juga berhak mengatur dan mempunyai yurisdiksi atas instalasi-instalasi, pulau-pulau buatan, dan bangunan-bangunan lainnya di Landas Kontinen. Instalasi, pulau-pulau buatan, dan bangunan-bangunan tersebut tidak dianggap sebagai pulau dan tidak memperoleh Laut Wilayah, Zona Tambahan, ZEE dan Landas Kontinen sendiri, tetapi dapat memperoleh “safety zone” selebar 500 meter disekeliling instalasi, pulau buatan, dan bangunan tersebut, yang tidak boleh dimasuki oleh kapal-kapal asing kecuali yang berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, memperkenankan lagi adanya “limited zone” selebar 1250 meter diluar “safety zone” tersebut, dimana kapal- kapal asing dilarang membuang jangkar. Konvensi Hukum Laut 1982 tidak mengenal adanya “limited zone” tersebut. Pada umumnya “limited zone” tersebut dimaksudkan untuk safety zone didalam Perairan Nusantara.

Di luar batas Landas Kontinen terdapat “*International*  *Seabed*  *Area*  *(ISA)*” yang pengelolaan kekayaan alamnya dilakukan oleh *International Seabed Authority* (ISBA) yang berkedudukan di Kingston, Jamaica. Oleh karena itu maka jika sesuatu negara mengklaim bahwa dia masih mempunyai Landas Kontinen di luar batas 200 mil laut dari garis-garis pangkalnya, maka negara tersebut haruslah menyampaikan batas terluar Landas Kontinen tersebut kepada “*Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)*” dalam waktu 10 tahun sejak berlakunya Konvensi tersebut bagi negara yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Lampiran II Konvensi HUKLA 1982. Indonesia meratifikasi Konvensi HUKLA pada tanggal 31 Desember 1985 dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 1985, sedangkan Konvensi itu sendiri baru diberlakukan, sejak tanggal 16 November

25

1994 dan sejak itu pulalah Konvensi tersebut berlaku secara resmi bagi Indonesia. *Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)* tersebut telah berdiri, dan sesuai dengan Konvensi, Indonesia akan harus mengajukan klaimnya atas Landas Kontinen diluar batas 200 mil laut dari garis-garis pangkal, jika ada, kepada Komisi tersebut menjelang 16 November 2004. Untuk itu diperlukan kegiatan survei kelautan (survei geofisika) untuk mengetahui apakah Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 76 Konvensi HUKLA 1982, masih mempunyai “*continental margin*” di luar batas 200 mil laut tersebut. Berdasarkan data geosesmik yang tersimpan di PBB, Indonesia masih mungkin melakukan klaim atas *continental margin* di luar 200 mil laut di sebelah Barat Aceh, di sebelah Selatan Sumbawa, dan di Utara Papua.

Namun disayangkan, dalam perjanjian perbatasan ZEE dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Australia 1997, Indonesia sepertinya telah menyerahkan batas Landas Kontinen tersebut kepada Australia, malah juga termasuk daerah dasar laut yang berada dalam batas 200 mil laut ZEEI. Disamping itu, kabarnya PBB juga sudah memperpanjang batas waktu pengajuan klaim “*continental margin*” tersebut bagi negara-negara pantai dengan 5 tahun lagi, yaitu sampai 16 November 2009. PBB pun melalui CLCS dapat membantu negara-negara berkembang, khususnya negara pantai yang berpotensi mempunyai “*continental margin*” yang luas untuk melakukan studi guna menentukan batas-batas terluar “*continental margin*” mereka.

**9. Perkembangan Terkini Survei Landas Kontinen.**

1. Ketersediaan Data. Dalam penentuan batas terluar landas kontinen diperlukan data penunjang, antara lain:

a. Data koordinat titik dasar yang tertuang dalam PP No. 38 Tahun 2002 dan direvisi dengan PP No. 37 Tahun 2008. PP No. 38 Tahun 2002 memuat daftar koordinat 183 titik dasar yang dapat digunakan untuk menggambarkan garis pangkal wilayah kepulauan Indonesia. PP No. 38 Tahun 2002 kemudian direvisi dengan PP No. 37 Tahun 2008 terkait dengan perubahan titik-titik dasar akibat berdirinya negara Timor Leste dan keputusan Mahkamah Internasional tentang Pulau Sipadan dan Ligitan.

b. World Vector Shoreline (WVS). WVS adalah garis pantai digital skala 1:250,000 produk dari NIMA (National Imagery and Mapping Agency) dalam format ASCII. WVS ini berisikan data garis pantai yang diperoleh dari Digital Landmass Blanking (DLMB), Operational Navigation Charts (ONCs), dan Tactical Pilotage Charts (TPCs). Batas-batas Internasional dan nama-

26

nama negara yang diperoleh dari peta hardcopy semisal ONCs, TPCs, dan Joint Operation Graphics (JOGs) juga termasuk di dalamnya.

c. Data batimetri hasil proyek *Digital*  *Marine*  *Resource*  *Mapping* (DMRM). Selama pelaksanaan proyek DMRM tahun 1996-1999, dilakukan survei batimetri dengan menggunakan SIMRAD EM12D Multibeam Echosounder. Jarak antar lajur dalam survei ini berkisar 100 km dengan cakupan sampai 200 mil laut dari garis pangkal.

d. Data Batimetri Global (ETOPO2). ETOPO2 adalah basisdata atau model batimetri dan topografi yang mencakup seluruh permukaan bumi dengan resolusi 2 menit x 2 menit. Data ini dimodelkan dari berbagai sumber baik dari hasil survei lapangan maupun pemodekan dari data satelit altimetri.

e. Ketebalan Sedimen. Data ketebalan sedimen yang dipakai dalam desktop study ini diperoleh dari *the*  *National*  *Geophysical*  *Data*  *Center* (NGDC). Data ini merupakan hasil kompilasi dari basisdata ketebalan sedimen digital dengan resolusi 5 menit x 5 menit.

2. Keberhasilan Indonesia atas Klaim Landas Kontinen Ekstensi di luar 200 mil laut sebelah barat laut Sumatera.

Pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa: “ *Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar teritorialnya sepanjang*  *kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut*“.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa untuk landas kontinen hingga 200 mil laut tidak perlu melakukan submisi untuk mendapatkan haknya, selama tidak mengganggu kepentingan negara yang berbatasan. Sebuah negara pantai juga memiliki kesempatan mengajukan klaim landas kontinen lebih dari 200 mil laut atau biasa disebut Landas Kontinen Ekstensi (LKE) jika negara tersebut telah memenuhi persyaratan seperti yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. Negara tersebut diwajibkan untuk melakukan submisi ke *Commission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS) sesuai dengan prosedur teknis yang telah ditentukan. Secara umum terdapat 4 (empat) tahapan untuk melakukan submisi landas kontinen di luar 200 mil laut. Berikut adalah pembahasan ketiga tahapan tersebut.

a. Pengumpulan Data. Tahap yang paling awal dalam setiap proses   
adalah tahap persiapan, dimana dalam kegiatan ini adalah persiapan data.   
Sebelum memasuki tahapan lebih lanjut, data harus sudah terkumpul terlebih   
dahulu. Data yang digunakan dalam kegiatan ini sebagaimana telah dibahas   
dalam sub bab sebelumnya, antara lain:

27

1) Data batimetri global (ETOPO2, Geodas) dan proyek *Digital Marine Resources Mapping* (DMRM) kerjasama Bakosurtanal dengan BPPT dan Dishidros TNI AL.

2) Data ketebalan sedimen global (NGDC/NOAA).

3) Koordinat titik dasar (PP No. 38 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan PP No. 37 Tahun 2008).

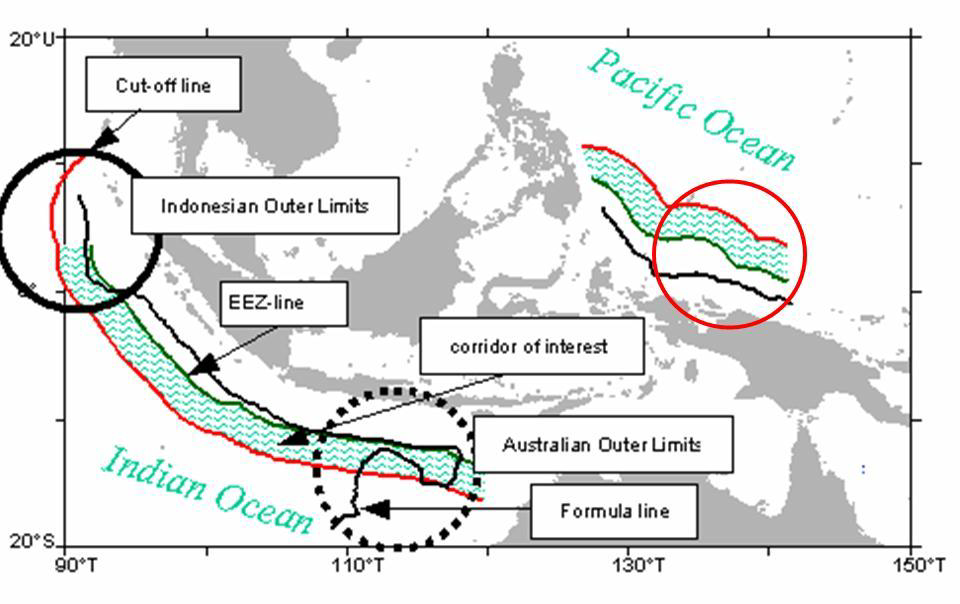
4) Garis Pantai dari *World Vector Shoreline.*

5) Peta ZEE hasil DMRM.

6) Data pendukung lainnya.

b. *Desktop*  *Study*. Untuk mengetahui apakah suatu negara memiliki potensi untuk melakukan klaim batas terluar landas kontinen di luar 200 mil laut, perlu dilakukan “*appurtenance*  *test*” melalui *desktop*  *study*  yaitumelakukan sketsa dan estimasi perhitungan awal menggunakan *software* di komputer. Dari data-data yang tersedia dan telah dilakukan *desktop study*, teridentifikasi 3 wilayah yang berpotensi untuk dilakukan submisi, yaitu: sebelah barat laut Sumatera, sebelah selatan Nusa Tenggara dan sebelah utara Papua.

Indonesia berencana melakukan submisi LKE secara parsial yang artinya dilakukan secara bertahap untuk masing-masing wilayah yang berpotensi. Wilayah barat laut Sumatera dipilih sebagai wilayah submisi pertama.



Gambar 4. Informasi tentang batas landas kontinen, garis 200 mil laut dan 350 mil laut dari garis pangkal, yang menunjukkan kontinental margin masih berada di dalam jarak 200 mil laut serta lokasi dari 3 (tiga) daerah prospek untuk submisi Landas Kontinen di luar 200 mil (Bakosurtanal, 2010)

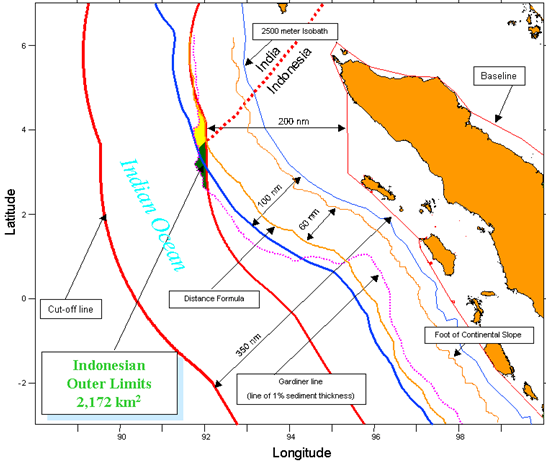
28



Gambar 5. Daerah potensi batas terluar landas kontinen lebih dari 200 mil laut (Bakosurtanal, 2010)

Desktop study dilakukan menggunakan Caris Lots 4.0 dan   
software pendukung lainnya (Matlab, AutoCAD dan Surfer).

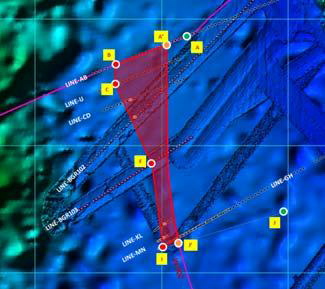
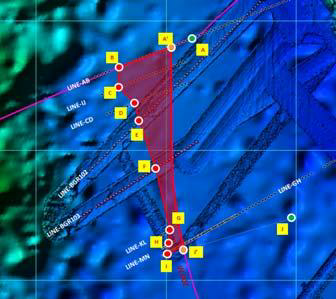
c. Survei Seismik Multichannel. Hasil *desktop study* mengindikasikan perlunya data ketebalan sedimen untuk mendukung data-data teknis, maka diperlukan survei seismik multichannel refleksi dan batimetri di sebelah barat laut Sumatera yang dillaksanakan pada 27 Januari – 15 Februari 2010 menggunakan kapal riset *Baruna Jaya II*. Kegiatan ini merupakan hasil kerja tim Bakosurtanal berkoordinasi dengan Balai Teksurla (BTSK) – BPPT, PPTISDA –BPPT, P3GL, DISHIDROS TNI AL, Balitbang KP dan PT.Elnusa Geoscience. Tujuan survei ini adalah untuk menentukan ketebalan sedimen sebagai data pendukung untuk keperluan submisi seperti yang dipersyaratkan oleh CLCS.



Gambar 6. Pengolahan data hasil survei daerah potensi landas kontinen lebih dari 200 mil laut (Bakosurtanal, 2010)

29

Data hasil survei tersebut kemudian diolah menggunakan *software* dan menghasilkan 3 alternatif batas terluar landas kontinen yang dapat dipertimbangkan, sebagai berikut :

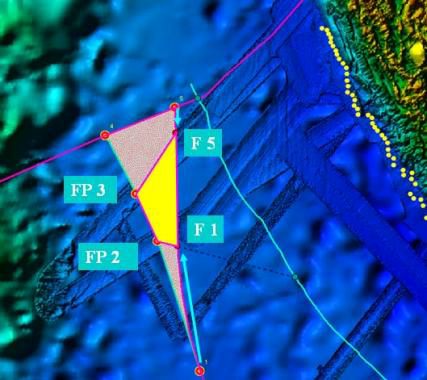
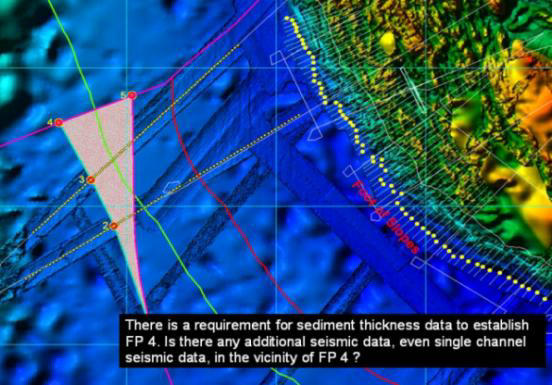


(a) Luas wilayah 3848 km2 (b) Luas wilayah 4232 km2 (c) Luas wilayah 4257 km2

Gambar 7. Alternatif lajur survei potensi landas kontinen lebih dari 200 mil laut (Bakosurtanal, 2010)

Dari perbandingan diatas, dapat disimpulkan bahwa opsi (c) adalah yang paling maksimal.

e. Submisi Batas Terluar Landas Kontinen. Indonesia telah melakukan pengkajian tentang kemungkinan submisi LKE sejak meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1985. Pada tahun 1996, dibuat suatu proyek *Digital Marine Resources Mapping* (DMRM) untuk mendapatkan data batimetri. Berdasarkan data-data yang tersedia dan telah dilakukan desktop study serta survei seismik multichannel refleksi, pemerintah Indonesia memasukkan dokumen parsial submisi ke *Commission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS) pada tanggal 16 Juni 2008. Submisi tersebut ditindaklanjuti dengan presentasi delegasi RI dalam sidang CLCS tanggal 24 Maret 2009. Secara umum, argumentasi pihak RI bisa diterima kecuali untuk titik nomor 1 dan 4 (FP1 dan FP4) diperlukan tambahan data seismik.



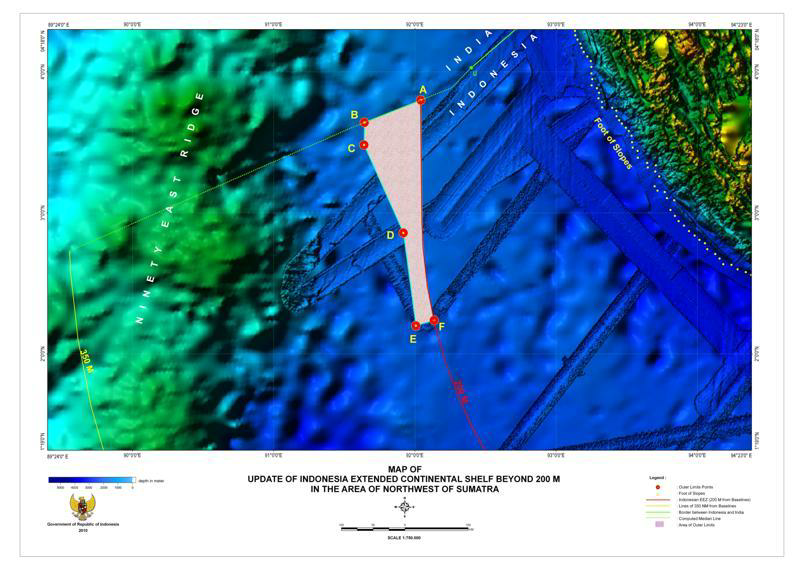
(a) (b)

30

Gambar 8. (a) Submisi parsial landas kontinen barat laut Sumatera; (b) Cakupan wilayah batas landas kontinen Indonesia apabila FP 1 dan FP 4 ditolak oleh CLCS (Bakosurtanal, 2010)

Jika FP1 dan FP4 ditolak, maka hanya 39% saja dari total submisi yang bisa di klaim. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, dilakukan kembali survei seismik refleksi multichannel di wilayah barat laut Sumatera pada tanggal 10 Januari – 18 Februari 2010 menggunakan kapal riset Baruna Jaya II. Pemerintah Indonesia kembali melakukan submisi ke CLCS dengan ditunjang data-data hasil survei tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh sub-komisi selama sidang ke 23-26, pada 17 Agustus 2010 Indonesia berkesempatan menyampaikan presentasi guna menjelaskan seluruh rangkaian proses submisi Indonesia yang telah dilakukan sejak 16 Juni 2008 sesuai Rule of Procedure CLCS Annex III paragraph 15.

Setelah melalui proses yang panjang, submisi landas kontinen Indonesia lebih dari 200 mil laut di sebelah barat laut Sumatera resmi diterima dan disahkan oleh CLCS. Pertambahan luas wilayah RI itu disampaikan Kepala Bakosurtanal dalam jumpa pers di Jakarta, 30 Agustus 2010. Pada tanggal 28 Maret 2011, CLCS menerbitkan dokumen resmi terkait submisi tersebut dan wilayah landas kontinen Indonesia resmi bertambah seluas 4209 km2 atau hampir seluas Pulau Madura.



Gambar 9. Penambahan wilayah landas kontinen Indonesia (Bakosurtanal, 2010)

31

**B. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Norma**

Berbagai norma atau prinsip sangat penting untuk diperhatikan dalam penysusnan draft RUU perubahan UU NO.1 Tahun 1973. beberapa norma atau prinsip tersbut meliputi :

1. Asas Pertahanan Negara

Klaim terhadap wilayah landas kontinen sarat dengan kepentingan pertahanan, karena semakin jauh klaim terhadap suatu wilayah sangat menguntungkan bagi aspek pertahanan. Jauhnya klaim wilayah landas kontinen semakin besar pula kita menagamati pihak asing yang akan memanfaatkan wilayah Indonesia. Landas kontinen dapat digunakan sebagai pgar Indonesia di wilayah laut karena letaknya jauh di luar wilayah teritorial Indonesia.

2. Asas Potensi Sumber daya

Masa depan sumber daya adalah di laut, untuk itu banyak negara-negara di dunia yang akan mengarahkan pemanfaatan sumber dayanya untuk menggali potensi yang ada di laut. Potensi laut yang sangat besar dan relatif belum dieksplorasi dan eksploitasi, sehingga masih sangat besar kemungkinan untuk didayagunakan.

3. Asas Negara Maritim

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan harus mempunyai kemampuan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah maritimnya, baik wilayah teritorialnya maupun hak eklusifnya, termasuk landas kontinen. Dengan penguasaan tersebut akan dapat digali berbagai potensi kelautan yang akan sangat berguna bagi upaya peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia.

4. Asas Kesesuaian Dengan Hukum Laut Internasional

Sebagaimana diketahui perjuangan Indonesia agar di akui sebagai negara kepulauan dengan berbagai haknya telah dilalui dalam kurun waktu yang panjang. Banyak pemikiran ahli hukum laut Indonesia yang dijadikan dasar dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS), oleh karena itu sudah sewajarnya bagi Indonesia untuk emmperhatikan berbagai ketentuan internasional dalam UNCLOS digunakan sebagai dasar dalam mengatur undang- undang yang berkaitan dengan pengaturan wilayah lautnya.

32

**C. Kondisi Pengaturan Landas Kontinen Saat Ini**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dibuat berdasarkan Konvensi Jenewa 1958 dan Draft Konvensi Hukum Laut Internasional. Draft tersebut dikenal sebagai *Revised Single Negotiating Text* (RSNT), sebelum disempurnakan dan pada akhirnya disahkankan menjadi Konvensi Hukum Laut Internasional yang baru pada tahun 1982. Oleh karena itu terdapat beberapa perbedaan antara ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1973 dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perkembangan dalam rezim hukum laut internasional antara Konvensi Jenewa 1958 dengan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, khususnya perkembangan pemahaman tentang konsep landas kontinen. Perkembangan pemahaman umat manusia tentang konsep landas kontinen terutama dipengaruhi oleh berbagai penemuan ilmiah tentang kondisi dasar laut dan samudera dalam (*seabed* dan *deep ocean floor*).

Dari hasil penelitian kelautan yang dilakukan oleh BPPT, Bakosurtanal, Oceanografi LIPI dan Dishidros TNI AL menunjukkan bahwa Indonesia dapat memperluas kliam wilayah landas kontinennya, khususnya untuk wilayah sebelah Selatan Pulau Sumatera dan sebelah utara Pulau Papua. Hasil penelitian tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang nasional agar klaim tersebut dapat diakui oleh dunia internasional. Oleh karena itu Perubahan atau Penggatian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen mutlak harus segera dilakukan untuk memperkuat klaim atas landas kontinen Indonesia.

Untuk itu diperlukan adanya penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 agar sesuai dengan rezim Hukum Laut Internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Penyesuaian yang utama adalah dalam metode penetapan batas untuk menentukan wilayah klaim landas kontinen Indonesia agar sesuai dengan rezim hukum laut internasional yang saat ini berlaku. Disamping itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 dalam pengaturannya masih bersifat sangat umum (hanya terdiri dari 14 pasal), sedangkan untuk pemanfaatan wilayah landas kontinen harus dilakukan secara lintas sektoral. Untuk itu dalam upaya mengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 harus pula memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

Selanjutnya beberapa peraturan perundang-undang terkait yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasinya adalah yang berkaitan dengan masalah status hukum, pemberian izin operasi atau eksplorasi/eksploitasi pemanfaatan sumber daya hayati dan non

33

hayati, kemungkinan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan-kegiatan di wilayah landas kontinen, beserta penegakan hukumnya.

**D. Implikasi dari Perubahan/Penggantian Undang-Undang No.1 Tahun 1973**

**1. Hukum**

Dasar hukum yang berbeda antara pengaturan Undang-Undang No.1 Tahun 1973 dengan perkembangan hukumlaut internasional berdampak pada teknis penentuan batas landas kontinen yang berbeda pula. Salah satu contohnya adalah tata cara penentuan batas landas kontinen untuk negara yang berhadapan atau berdampingan yang diatur dalam Pasal 6 UNCLOS 1958 dan Pasal 84 UNCLOS 1982. UNCLOS 1958 menerapkan prinsip *median line* atau *equidistance principle* bilamana tidak terdapat keadaan khusus yang memungkinkan garis batas ditentukan tidak sama jarak. Sebaliknya, UNCLOS 1982 memberikan keleluasaan dengan merujuk pada tercapainya kesepakatan antar pihak yang terkait sesuai dengan prinsip- prinsip hukum internasional publik.

Penetapan dan penegasan batas maritim sangat diperlukan terutama dalam pengelolaan laut. Penentuan batas sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi (*jurisdictional clarity and certainty*) (Prescott dan Schofield, 2005 dalam Arsana, 2007). Hal ini dapat memberikan keuntungan multidimensi, misal dalam memfasilitasi pengelolaan lingkungan laut secara efektif dan berkesinambungan serta peningkatan keamanan maritim (maritim security). Perjanjian batas maritim akan memberikan jaminan hak Negara pantai untuk mengakses dan mengelola sumberdaya maritim hayati maupun non- hayati (Arsana, 2007).

Landas kontinen mengandung sumber energi dan mineral, sehingga berpotensi besar mengakibatkan sengketa antar negara yang berbatasan dan berkepentingan. Kasus perebutan Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia yang merebak mulai tahun 2005 merupakan salah satu contoh sengketa akibat ketidakpastian posisi, eksistensi dan status hukum dasar laut yang tunduk pada rezim landas kontinen.

Keterangan mengenai batas-batas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur harus disampaikan oleh Negara pantai kepada Komisi Batas-batas Landas Kontinen (*Commision*  *on*  *the*  *Limits*  *of*  *the*  *Continental*  *Shelf*) yang didirikan

34

berdasarkan Lampiran II atas dasar perwakilan geografis yang adil. Komisi ini harus membuat rekomendasi kepada negara pantai mengenai masalah yang bertalian dengan penetapan batas luar landas kontinen mereka. Batas-batas landas kontinen yang ditetapkan oleh suatu negara pantai berdasarkan rekomendasi-rekomendsai ini adalah tuntas dan mengikat.

Negara pantai harus mendepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa peta-peta dan keterangan yang relevan termasuk data geodesi, yang secara permanen menggambarkan batas luar landas kontinennya. Sekretris Jenderal ini tidak boleh mengurangi arti masalah penetapan batas landas kontinen antara Negara-negara yang berhadapan atau berdampingan.

Teknis penentuan batas terluar landas kontinen diatur dalam Pasal 76 ayat (4) sampai dengan ayat (6) UNCLOS 1982. Secara umum, penentuan batas landas kontinen dapat dibagi menjadi tiga kondisi, yaitu :

1. Penentuan batas landas kontinen kurang dari 200 mil laut. Batas terluar dari landas   
kontinen adalah sejauh 200 mil laut atau berhimpit dengan batas Zona Ekonomi   
Eksklusif (ZEE). Konsep ini dikenal dengan *Coextensive Principle*.

2. Penentuan batas landas kontinen lebih dari 200 mil laut. Batas terluar landas   
kontinen mengacu pada empat ketentuan penentuan pinggiran luar tepian kontinen.

3. Penentuan batas landas kontinen yang berbatasan dengan negara pantai lainnya.   
Batas terluar landas kontinen mengacu pada perjanjian antara negara yang   
berkepentingan. Hal ini terjadi jika jarak antar negara kurang dari 400 mil laut.

Dalam hal suatu negara pantai berada jauh dari negara pantai lainnya, maka ada kemungkinan semua klaim wilayah maritim dapat dilakukan tanpa mengganggu hak negara lain atau dapat dilakukan secara sepihak (*unilateral*). Bahkan untuk landas kontinen, dimungkinkan untuk melakukan klaim batas terluar landas kontinen di luar 200 mil laut atau dikenal dengan Landas Kontinen Ekstensi (LKE).

Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Posisi tersebut membuat Indonesia rawan bersengketa dengan negara tetangga. Salah satu masalah yang rentan

35

menjadi konflik adalah mengenai wilayah perbatasan, terutama batas maritim yang mana tidak terdapat tanda batas secara fisik sebagaimana batas di daratan.

Apabila Indonesia tidak dengan segera melakukan penetapan wilayah landas kontinen Indonesia sesuai dengan Konvensi Hukum laut Internasional Tahun 1982, maka kemungkinan . Penetapan landas kontinen Indonesia yang dikuatkan dengan undang-undang yang mengaturnya akan memberikan implikasi hukum yang cukup besar bagi pihak-pihak yang terkait di alndas kontinen. Pembuatan UU tentang landas Kontinen juga sangat sesuai dengan beberapa perintah dari Konvensi Hukum laut Internasional Tahun 1982 yang harus segera ditindak lanjuti oleh Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut.

Akan tetapi dalam penggantian UU No.1 Tahun 1973 harus juga melibatkan instansi terkait. Keterlibatan instansi terkait sangat penting sebab wilayah landas kontinen sejak dari ikrar pengklaimannya hingga kemungkinan pemanfaatannya bersifat multi sektoral dan multi disipliner. Instansi-instansi terkait yang menangani pemberian analisis dampak lingkungan, pemberian izin penelitian kelautan, pemberian izin usaha pertambangan, usaha perikanan mamupun penegakan hukumnya sangat penting untuk berkoordinasi. Oleh karena itu pengikutsertaan instansi-instansi yang menangani bidang-bidang tersebut mutlak diperlukan, agar penggantian UU tentang landas Kontinen tidak saling tumpang tindih atau berbenturan dengan berbagai undang-undang terkait, sehingga tidak membingungkan para pelaksana di lapangan.

**2. Keuangan Negara**

Keterlambatan dalam penetapan klaim wilayah landas kontinen nasional, maka Indonesia tidak dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang terdapat di wilayah landas kontinen tersebut. Pada saat ini terdapat kecenderungan negara- negara pantai mengklaim landas kontinen yang jauh dari wilayahnya, misalnya Australia yang mengklaim landas kontinen di Antartika. Pernyataan klaim tersebut tidak terlepas dari potensi sumber daya mineral di wilayah landas kontinen.

Pada umumnya wilayah landas kontinen memilki kandungan mineral dan gas bumi cukup besar yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Di samping itu pandangan negara- negara besar di masa yang akan datang adalah potensi wilayah laut termasuk landas kontinen.

36

Apabila Indonesia terlambat mengajukan klaim akan berakibat bahwa potensi di landas kontinen tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Oleh karena itu adalah kewajiban negara untuk memberikan perhatian kepada wilayah laut, termasuk landas kontinen. Negara harus memberikan dana yang mencukupi dan memadai untuk kepentingan penelitian di landas kontinen, terutama wilayah-wilayah yang besar kemungkinan bagi Indonesia untuk mengklaimnya, misalnya di sebelah utara Pulau Papua dan sebelah selatan Kepulauan Nusa Tenggara.

Disamping itu untuk menggali potensi landas kontinen sangat diperlukan adanya penelitian kelautan yang dilakukan secara terpadu dengan koordinasi secara baik. Penelitian kelautan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan agar hasil penelitian yang diperoleh mampu meyakinkan banyak pihak mengenai potensi yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan adanya dukungan penganggaran bagi penelitian wilayah kelautan termasuk di landas kontinen baik landas kontinen yang sudah dilakukan klaim maupun landas kontinen yang (layak) dilakukan klaim.

37

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985**

Dengan telah diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS, 1982) dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982, maka rezim hukum laut mengenai landas kontinen Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 (yang mengakomodasikan Konvensi tahun 1958) menjadi tidak sesuai lagi dengan rezim landas kontinen menurut Kovensi Hukum Laut Internasional yang baru. Terdapat perbedaan antara rejim hukum landas kontinen dalam UNCLOS 1982 dengan yang telah diatur sebelumnya dalam UNCLOS 1958. Jika UNCLOS 1958 menggunakan kriteria keterikatan geomorfologis (*natural*  *prolongation*) dan kemampuan eksploitasi (*technical exploitability*), sebaliknya UNCLOS 1982 menggunakan kriteria jarak (*distance criteria*) minimal landas kontinen negara pantai sejauh 200 mil laut dan boleh melebihi jarak tersebut dengan syarat tertentu. Dibandingkan dengan UNCLOS 1958 yang menggunakan prinsip kemampuan eksploitasi (*technical*  *exploitability*) sehingga menguntungkan negara-negara yang memiliki teknologi maju dalam bidang pertambangan, UNCLOS 1982 memberikan rumusan hukum yang jelas dan adil bagi semua negara.

**B. Perjanjian Batas Landas Kontinen**

Sampai saat ini, terdapat beberapa wilayah Indonesia yang *overlap* dengan negara

tetangga belum ditentukan dan disepakati batas maritimnya, baik menyangkut laut teritorial, zona tambahan, ZEE maupun landas kontinen. Berikut ini adalah perjanjian yang telah ada berkaitan dengan Landas Kontinen Indonesia dapat dirangkum sebagai berikut (Djunarsjah dan Dewantara, 2002) :

1. Indonesia – Australia

Perjanjian yang dibuat antara Indonesia dengan Australia menghasilkan ketentuan

yang merugikan Indonesia. Kerugian tersebut muncul karena tidak ditegakkannya   
prinsip *coextensive principle*. Batas landas kontinen Australia masuk kedalam

38

batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia, hal ini menyebabkan batas   
landas kontinen lebih dekat ke pantai Indonesia. Dengan ditegakkannya *co-*   
*extensive principle* batas landas kontinen Indonesia seharusnya berimpit dengan   
batas ZEE

2. Indonesia – Malaysia

Perjanjian batas landas kontinen dengan Malaysia masih menggunakan UNCLOS

1958 sebagai acuan. Terdapat persetujuan yang merugikan Indonesia dimana garis   
batas landas kontinen antara kedua negara lebih dekat ke pantai Indonesia di Selat   
Malaka (perjanjian menggunakan prinsip median line).

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Pengesahan Persetujuan   
Antara RI - Malaysia Dan Kerajaan Thailand Tentang Landas Kontinen

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972 Tentang Pengesahan Persetujuan   
Antara RI Dan Pemerintah Thailand Tentang Penetapan Garis Batas Landas   
Kontinen

3. Indonesia – Vietnam

Perjanjian antara Indonesia dengan Vietnam belum dapat menyelesaikan batas

landas kontinen kedua negara. Jarak antar pulau yang berdekatan antara kedua   
negara tidak lebih dari 245 mil laut. Vietnam bersikeras untuk tidak menggunakan   
UNCLOS 1982 sebagai acuan secara menyeluruh.

Telah ada persetujuan antara RI dengan Vietnam mengenai Landas Kontinen   
dengan terbitnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pengesahan   
Peersetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam   
Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen 2003.

4. Indonesia – Palau

Untuk menarik suatu batas ZEE yang adil, mengingat jarak antara P. Helen (pulau

paling Selatan Palau) dengan P. Fani/P.P. Asia kurang dari 400 mil laut, maka   
sebaiknya diterapkan metode sama jarak (*equidistance*).

5. Indonesia – Philipina

Perjanjian antara Indonesia dan Philipina masih belum berhasil menetapkan batas

landas kontinen antara kedua negara. Tertundanya perjanjian antara kedua negara   
ini lebih disebabkan karena belum akuratnya titik pangkal yang digunakan oleh   
Philipina. Akan tetapi berdasarkan jarak antara kedua negara di Utara Sulawesi   
kemungkinan besar perundingan penentuan batas landas kontinen antara kedua   
negara ditetapkan berdasarkan prinsip *median line*.

39

6. Indonesia - India

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 Tentang Mengesahkan Persetujuan

Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik India Tentang Perpanjangan   
Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Di Laut Andaman Dan Samudra Hindia   
Di New Delhi.

**C. Perbandingan Antara Konvensi Jenewa 1958 dengan UNCLOS 1982**

Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jaraknya 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 mil. Landas Kontinen adalah daerah di bawah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran laut tepi kontinen, sehingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Garis batas luar kondisi kontinen pada dasar laut, tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (*isobath)* 2500 m, kecuali untuk elevasi dasar laut yang merupakan bagian alamiah tepian kontinen, seperti pelataran (*plateau*), tanjakan (*rise*), puncak (*caps*), ketinggian yang datar ( *banks*) dan puncak gunung yang bulat (*spurs*).

Tabel berikut ini akan diuraikan perbandingan antara ketentuan Konvensi Jenewa 1958 tentang landas kontinen dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi hukum laut 1982.

|  |  |
| --- | --- |
| **LANDAS KONTINEN (CONTINENTAL SHELF)** | |
| KONVENSI JENEWA 1958 | KONVENSI HUKUM LAUT 1982 |
| A. *Batasan Landas Kontinen*  - | A. *Batasan Landas Kontinen*  Landas Kontinen suatu negara pantai  meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari  daerah dibawah permukaan laut yang terletak  di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan  alamiah hingga daratannya hingga pinggiran  luar kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil |

40

|  |  |
| --- | --- |
| mengekplorasi-nya dan mengekploitasi sumber-sumber daya alamnya (pasal 1)  -  Dari bunyi atau rumusan pasal 1 tersebut batas luar Landas Kontinen sama sekali menunjukkan adanya ketidakpastian. | laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorialnya diukur (Pasal 76 (1)).  Landas Kontinen suatu negara pantai tidak  boleh melebihi dari batas-batas sebagaimana  ditentukan dalam ayat 4 hingga ayat 6 (Pasal  76 (2)).  Dalam konvensi ini batas luar dari Landas Kontinen sudah cukup tegas dan jelas. Berarti sudah ada kepastian hukum tentang sejauhmana suatu negara memiliki hak dan eksklusif atas sumber daya alam dari Landas Kontinen. |

41

**LANDAS KONTINEN (*CONTINENTAL SHELF*)**

Konvensi Jenewa 1958 Konvensi Hukum Laut 1982

B. Hak dan Kewajiban Negara Pantai

- Sama dengan ketentuan Pasal 2 (1).

- Sama dengan ketentuan Pasal 2 (3)

- Sama dengan ketentuan Pasal 2 (2)

Kewajiban negara pantai

B. Hak dan Kewajiban Negara Pantai

- Negara pantai menjalankan hak berdaulat di   
landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan   
eksploitasi sumber daya alam. (Pasal 77 (1)).

- Hak negara pantai tidak tergantung pada   
pendudukan atau proklamasi yang   
diumumkan. (Pasal 77 (3)).

Tidak ada negara lain yang dapat melakukan   
ekploitasi sumber kekayaan alam tanpa   
persetujuan negara pantai. (Pasal 77 (2))

- Negara pantai mempunyai hak eksklusif   
untuk mengizinkan dan mengatur pemboran   
landas kontinen untuk segala keperluan.   
(Pasal 81).

Kewajiban negara pantai

- Negara pantai harus mendeposit-kan pada   
Sekretaris Jenderal PBB peta-peta dan   
keterangan yang relevan, yang secara   
permanen menggambarkan batas luar landas   
kontinennya (Pasal 76 (9) dan Pasal 84 (1)   
dan (2)).

- Negara pantai tidak boleh menghalangi   
pemasangan atau pemeliharaan kabel atau   
pipa. (Pasal 79 (2)).

42

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | - Negara pantai harus melakukan pembayaran atau sumbangan kepada otorita berkaitan dengan eksploitasi sumber kekayaan non hayati di landas kontinen diluar 200 mil laut. (Pasal 82 (1)) dan ayat (4) |
|  | |
| *C. Status hukum dan Ruang Udara* | *C.* | *Status hukum dan Ruang Udara diatas*  Landas kontinen serta hak dan kekebalan negara lain  Hak negara pantai atas landas kontinen tidak  mempengaruhi status hukum perairan diatas-  nya dan ruang udara (pasal 78 (1))  Pelaksanaan hak negara pantai atas landas  kontinen tidak boleh mengurangi atau  mengganggu terhadap pelayaran dan hak serta  kebebasan negara lain. (Pasal 78 (2)). |
| *Diatas*  Landas kontinen serta hak dan kekebalan negara lain  -  - | |

**D. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Terkait (Nasional)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO. |  |  | UU LANDAS |  |  | UU LAIN |  |  | KETERANGAN |  |
|  | | | KONTINEN |  | | |  | | |
| 1. | | | Instalasi  Telekomunikasi | | | UU NO 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi  Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Penyelenggaran dan Masyarakat  Pasal 12 ayat 2: Pemanfaatan ataw pelintasan tanah negara dan ataw bangunan sebagaimana dimaksut pada ayat (1) berlaku pula terhadap | | |  | | |

43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sungai,danau atau laut, baik permukaan maupun dasar.  Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.  **KETENTUAN PIDANA**  Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). |  |
| 2. | Instalasi listrik | Undang-undang nomor 30 tahun  2009 tentang Ketenagalistrikan  Bagian Keempat  Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik  Pasal 27  (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha  penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) |  |

44

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | berhak untuk:  a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;  b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;  c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;  d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan  menggunakannya untuk sementara waktu;  e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di  bawah tanah;  f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan  g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.  (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. |  |

45

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **SANKSI ADMINISTRATIF**  Pasal 48  (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:  a. teguran tertulis;  b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau  c. pencabutan izin usaha. |  |
| 3. | Pertahanan dan  Keamanan | Undang – Undang no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.  BAB II  HAKIKAT, DASAR, TUJUAN, DAN FUNGSI  Pasal 2  Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.  (1) Pertahanan negara disusun  berdasarkan prinsip  demokrasi, hak asasi |  |

46

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.  (2) Pertahanan negara disusun  dengan memperhatikan  kondisi geografis Indonesia  sebagai negara kepulauan.  Pasal 10  (3) Tentara Nasional Indonesia  bertugas melaksanakan  kebijakan pertahanan negara  untuk :  a. mempertahankan kedaulatan  negara dan keutuhan  wilayah;  b. melindungi kehormatan dan  keselamatan bangsa;  c. melaksanakan Operasi  Militer Selain Perang; dan  d. ikut serta secara aktif dalam  tugas pemeliharaan perdamaian  regional dan internasional. |  |
| 4. | Perhubungan | UU No 17 Tahun 2008 tentang  Pelayaran |  |

47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Lingkungan dan  Pencemaran | UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup  UU No.5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. | Sebagai dasar dalam pengawasan  lingkungan dan  pencegahan serta  penindakan terhadap pencemaran yang  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  pemerintah wajib  memberikan  pengawasan dan  pemberian ijin secara ketat dan selektif  terhadap para  pengelola usaha  pertambangan. |
| 6. | Eksplorasi dan  Eksploitasi | UU No.22 Tahun 2011 Tentang Minyak Bumi dan Gas. | Sebagai dasar dalam melakukan  eksplorasi dan  eksploitasi sumber  daya alam  pemerintah wajib  memberikan  pengawasan dan  pemberian ijin secara ketat/selektif  terhadap para  pengelola usaha  pertambangan  dengan |

48

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mempertimbangkan aspek kemakmuran  rakyat dan  pemasaukan  pendapatan negara  melalui pajak usaha  serta jangka waktu  usaha yang diberikan oleh pemerintah.  Agar tetap terjaganya keseimbaangan hasil alam dengan baik  dari eksploitasi  pertambangan. |

**E. Sistimatika UU Landas Kontinen Indonesia Saat Ini**

Dalam rangka menjamin kepastian hukum serta dasar bagi pelaksanaan hak-hak eksploitasi di landas kontinen Indonesia, pada tanggal 6 Januari 1973 Pemerintah mengukuhkan UU No.1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia terkesan sangat simpel. Undang-undang ini terdiri atas 14 pasal dengan sistematika sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| BAB I | Ketentuan Umum |
|  | Pasal 1   Landas Kontinen Indonesia diartikan sebagai dasar laut dan tanah  dibawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai  kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin  diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.   Kekayaan alam tersebut meliputi sumberdaya alam hayati (organisme  jenis sedenter) maupun non-hayati (mineral dan sumber yang tak  bernyawa lainnya di dasar laut) |
| BAB II | Status Kekayaan Alam di Landas Kontinen |
|  | Pasal 2 |

49

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Menyatakan bahwa penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara.  Pasal 3   Dalam hal landas kontinen berbatasan dengan negara tetangga,  penentuan batas dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan  untuk mencapai suatu persetujuan. |
| BAB III | Eksplorasi, Ekploitasi dan Penyelidikan Ilmiah |
|  | Pasal 4 dan 5   Mendelegasikan kepada peraturan perundangan yang berlaku di masing-  masing bidang terkait kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan penyelidikan  ilmiah di Landas Kontinen Indonesia. |
| BAB IV | Instalasi |
|  | Pasal 6 dan 7   Mengatur tentang pembangunan instalasi untuk kegiatan eksplorasi dan  eksploitasi di Landas Kontinen.   Penetapan daerah terlarang (*safety zone*) yang lebarnya tidak melebihi  500 meter dihitung dari setiap titik terluar instalasi dimana kapal pihak  ketiga dilarang lewat dan membuang/membongkar sauh.   Penetapan daerah terbatas (*prohibited area*) selebar tidak melebihi 1.250  meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang, dimana kapal-  kapal pihak ketiga boleh lewat tetapi dilarang membuang atau  membongkar sauh. |
| BAB V | Pencemaran |
|  | Pasal 8   Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilaksanakan di landas  kontinen berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena  itu diwajibkan mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap  terjadinya dan meluasnya pencemaran air laut di landas kontinen dan  udara di atasnya. |
| BAB VI | Yuridiksi Negara |
|  | Pasal 9   Menyatakan bahwa hukum dan segala peraturan perundang-undangan  Indonesia berlaku terhadap setiap perbuatan dan peristiwa yang terjadi  pada, di atas atau di bawah instalasi-instalasi, alat-alat lainnya atau  kapal-kapal yang berada di landas kontinen. Prinsip yuridiksi tersebut  telah diakui dan dibenarkan oleh Hukum Internasional.   Untuk melindungi perekonomian nasional, instalasi dan alat-alat di  landas kontinen Indonesia yang dipergunakan untuk eksplorasi dan  eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dinyatakan sebagai daerah  Pabean Indonesia. |

50

|  |  |
| --- | --- |
| BAB VII | Perlindungan Terhadap Kepentingan-Kepentingan Lain |
|  | Pasal 10   Mengatur tentang perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan lain  yang ada di landas kontinen Indonesia, antara lain:  a. Pertahanan dan keamanan nasional;  b. Perhubungan;  c. Telekomunikasi dan transmisi listrik dibawah laut;  d. Perikanan;  e. Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya;  f. Cagar alam.   Apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut,  Pemerintah dapat menghentikan untuk sementara waktu pengusahaannya  atau dapat mencabut izin usaha yang bersangkutan. |
| BAB  VIII |  |
|  | Pasal 11 dan 12   Mengatur sanksi atas pelanggaran terhadap Pasal 4, 5 dan 8 yaitu  maksimal hukuman penjara 6 tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000,- |
| BAB IX | Ketentuan Penutup |
|  | Pasal 13 dan 14   Menyatakan pemberlakuan Undang-undang dan pengaturan lebih lanjut  melalui Peraturan Pemerintah. |

**F. Analisis Terhadap Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia**

Landas Kontinen Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 yang pembuatannya mengacu kepada UNCLOS 1958 Tahun 1958. Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 yang mana disebutkan bahwa Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Definisi diatas dinilai masih rancu, karena tidak ada batasan yang jelas tentang sejauh mana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi boleh dilakukan mengingat kemampuan dan teknologi yang digunakan masing-masing negara tidaklah sama. Interpretasi seperti itu tidak dapat diterima karena hanya akan menguntungkan negara dengan letak geografis tertentu terutama negara dengan perkembangan teknologi yang sudah mencapai tingkat tinggi.

51

Ketidakpastian mengenai landas kontinen berakhir dengan dirumuskannya UNCLOS 1982 yang kemudian ditetapkan sebagai satu-satunya Hukum Laut Internasional. Indonesia sebagai salah satu negara anggota harus tunduk kepada UNCLOS 1982 dan kemudian meratifikasi peraturan tersebut menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

Bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 merupakan ratifikasi dari UNCLOS 1982 secara keseluruhan, Undang-Undang tersebut hanya memuat tentang Landas Kontinen secara umum. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara terperinci mengatur tentang Landas Kontinen Indonesia, sehingga Indonesia tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengatur Landas Kontinen di wilayahnya. Mengingat Undang-undang tentang landas kontinen Indonesia yang berlaku saat ini (Undang- Undang No. 1 Tahun 1973) sudah tidak relevan karena menggunakan acuan yang sama sekali berbeda, maka perlu dilakukan revisi atau pembuatan Undang-Undang baru untuk menggantikan Undang-Undang tersebut.

52

**BAB IV**

**Landasan Filosofis, Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis**

A. Landasan Filosofis

Bahwa sumber daya alam hayati dan non hayati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus diupayakan dikuasai dan diekslporasi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang terdapat di landas kontinen Indonesia, khususnya sumber daya non hayati dan mineral harus dikuasai, dieksplorasi dan dijaga kelestariannya. Pennguasaan

sumber daya alam di landas kontinen Indonesia diusahakan sesuai dengan kepentingan nasional dan ketentuan hukum laut internasional.

Perkembangan ketentuan hukum laut internasional yang memungkinkan Indonesia untuk mengubah cara menghitung wilayah landas kontinennya harus dimanfaatkan secara maksimal. Pengakuan wilayah landas kontinen Indonesia harus didukung dengan peraturan perundang-undangan nasional yang memadai.

Bahwa pengaturan dalam UU No.1 Tahun 1973 yang didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1958 dan draft UNCLOS berbeda dengan ketentuan internasional pada UNCLOS 1982, sehingga diperlukan adanya penyesuaian.

Beberapa pengaturan yang membedakannya antara lain dalam metode pengukuran suatu wilayah masuk dalam landas kontinen suatu Negara atau tidak. Dalam UU No.1 Tahun 1973 penentuan suatu wilayah diukur dari 200 nautica mile (mil laut) dari saat air surut, dalam UNCLOS 1982 tidak didasarkan pada hal tersebut, tetapi dapat didasarkan pada kelanjutan alamiah dari wilayah pantai negara yang bersangkutan, bahkan sampai kedalaman 2.500 meter.

B. Landasan Yuridis

Bahwa bumi, air dan kekayaan yang berada di dalamnya dikuasi oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, demikian bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Salah satu dari penjabaran ketentuan tersebut adalah

53

adanya penetapan wilayah landas kontinen Indonesia, yang didasarkan pada ketentuan dalam UU No.1 tahun 1973.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya alam hayati dan non hayati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus diupayakan dikuasai dan diekslporasi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang terdapat di landas kontinen Indonesia, khususnya mineral harus pula dikuasai, dieksplorasi dan dijaga kelestariannya. Penugasaan sumber daya alam di landas kontinen Indonesia diusahakan sesuai dengan kepentingan nasional dan ketentuan hokum laut internasional.

Perkembangan ketentuan hukum laut internasional yang memungkinkan Indonesia untuk mengubah cara menghitung wilayah landas kontinennya harus dimanfaatkan secara maksimal. Pengakuan wilayah landas kontinen Indonesia harus didukung dengan peraturan perundang-undangan nasional yang memadai. Bahwa pengaturan dalam UU No.1 Tahun 1973 yang didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1958 dan draft UNCLOS berbeda dengan ketentuan internasional pada UNCLOS 1982.

Akan tetapi ketentuan mengenai landas kontinen Indonesia dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum laut internasional yang sedemikian cepat, sehingga kurang menguntungkan bagi negara. Dalam beberapa ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1973 belum mengadopsi berbagai perkembangan hukum laut internasional, khususnya mengenai tatacra penetapan wilayah landas kontinen. Ketentuan yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1973 mengenai tatacara penentuan landas kontinen belum mengacu pada Hukum Laut 1982, tetapi masih didasarkan pada Konvensi Jenewa Tahun 1958. Hal itu akan sangat merugikan Indonesia dalam forum internasional berkaitan dengan penentapan landas kontinen.

Disamping itu perkembangan ketatanegaraan nasional juga perlu diperhatikan mengingat telah semakin banyaknya kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam di laut, khususnya di wilayah landas kontinen diperlukan adanya harmonisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, agar tidak tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) peraturan dan kewenangan.

54

C. Landasan Sosiologis

Dengan semakin canggihnya penguasaan teknologi kelautan, maka wilayah laut sangat berpotensi sebagai daerah yang dapat menjadi buffer atau penyangga bagi kemungkinan infiltrasi pihak lain yang akan menganggu. Semakin jauh penguasaan suatu negara terhadap wilayah laut semakin besar perlindungan yang dapat dilakukan oleh negara yang bersangkutan.

Apabila hasil-hasil tersebut tidak segera ditindak lanjuti terutama dalam bentuk undang-undang maka Indonesia akan mengalami kesulitan dalam penetapan batas wilayah landas kontinen karena wilayah tersebut dapat disengketakan oleh Negara lain.

Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terbesar di dunia sudah selaknya memperhatikan semua potensi yang memungkinkan bagi negara pantai untuk meningkatkan klaim landas kontinen, merupakan kesempatan yang diperoleh berdasarkan UNCLOS Tahun 1982. Hal itu penting karena juga berkaitan dengan kemungkinan bangsa Indonesia untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi landas kontinen Indonesia yang semakin luas, asal disertai dengan peningkatan kemampuan teknologinya.

D. Landasan Ekonomis

Potensi kekayaan sumber daya mineral yang terdapat di wilayah laut dalam seperti landas kontinen akan semakin diharapkan sebagai sumber ekonomi negara. Hal itu menyebabkan semakin banyak negara-negara pantai mengklaim landas kontinennya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat berkepentingan untuk melakukan klaim landas kontinennya sesuai dengan UNCLOS Tahun 1982, karena dari sisi ekonomis kandungan yang terdapat dilandas kontinen sekitar Kepulauan Nusantara sangat besar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada potensi yang cukup besar bagi bangsa Indonesia untuk menentapkan batas landas kontinen yang lebih luas apabila menggunakan ketenutan yang terdaapat dalam UNCLOS 1982. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat kecenderungan bahwa sumber daya mineral pada wilayah-wilayah landas kontinen suatu mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi, terutama berkaitan dengan mineral dan gas bumi.

55

Penetapan landas kontinen secara cermat akan memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia untuk melakukan eksplorasi agar tidak diklaim oleh Negara lain.

Dengan semakin canggihnya penguasaan teknologi kelautan, maka wilayah laut sangat berpotensi sebagai daerah yang dapat menjadi buffer atau penyangga bagi kemungkinan infiltrasi pihak lain yang akan menganggu. Semakin jauh penguasaan suatu negara terhadap wilayah laut semakin besar perlindungan yang dapat dilakukan oleh negara yang bersangkutan.

Apabila hasil-hasil tersebut tidak segera ditindak lanjuti terutama dalam bentuk undang-undang maka Indonesia akan mengalami kesulitan dalam penetapan batas wilayah landas kontinen karena wilayah tersebut dapat disengketakan oleh Negara lain.

E. Landasan Peratahanan dan Keamanan Negara.

Landas kontinen suatu negara dapat digunakan sebagai wilayah pertahanan paling luar dari negara pantai seperti Indonesia. Dengan penetapan landas kontinen akan sangat mendukung dari sisi pertahanan keamanan negara kareana wilayah yang dapat dipergunakan sebagai daerah pemantauan oleh kapal-kapal Indonesia semakin jauh dari pantai, sehingga semakin memungkinkan bagi antisipasi apabila ada gangguan dari luar, yang berasal dari wilayah laut.

56

**BAB V**

**JANGKAUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN**

**A. Sasaran, Arah Dan Jangkauan Pengaturan**

Sasaran dari naskah akademik ini adalah memberikan arah pengaturan bagi penyusunan RUU Perubahan/Penggantian Undang-Undang No.1 tahun 1973 tentang landas Kontinen. Hal ini penting sebab penyusunan RUU Landas Kontinen sangat berkaitan erat dengan ketentuan Hukum Laut Internasional, sehingga ketentuan-ketentuan yang dihasilkannya tidak bertentangan dengan Hukum Laut Internasional yang telah diratifikasi lama oleh Indonesia.

Jangkauan pengaturan mengenai landas kontinen adalah undang-undang. Hal ini disebabkan pengaturan landas kontinen berkaitan dengan yurisdiksi kewilayahan walaupun tidak berkaitan dengan teritorial, tetapi sangat berkaitan langsung dengan salah satu hak sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*). Oleh karena itu pengaturan mengenai landas kontinen harus dilakukan melalui undang-undang.

Selama ini telah ada undang-undang tentang Landas Kontinen yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1973, akan tetapi substansi pengaturannya belum didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982. substansi yang digunakan masih didasarkan Konvensi Jenewa 1958.

Untuk itu sudah selayaknya, Indonesia segera mengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1973 karena rezim pengaturan mengenai hukum laut antara keduanya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Di samping itu terdapat kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk segera menindaklanjuti UNCLOS tahun 1982 sebagai negara yang telah meratifikasinya.

**B. Ruang Lingkup Pengaturan**

Ruang lingkup pengaturan dalam UU No.1 Tahun 1973 masih sederhana yang terdiri dari hanya 14 pasal. Hasil penelitian kelautan menunjukkan adanya potensi bagi Indonesia untuk melakukan klaim terhadap area landas kontinen yang cukup besar. Di samping itu dengan telah berkembangnya teknologi pemanfaatan area landas kontinen, maka pengaturan

57

mengenai landas kontinen sebaiknya dilengkapi dengan pengaturan terkait lainnya, yang meliputi : pengaturan mengenai eksplorasi dan eksploitasi mineral, pemasangan pipa atau alat komunikasi bawah laut, penelitian ilmiah kelautan dan kemungkinan adanya pencemaran di area landas kontinen.

Dalam RUU tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1973 perlu dicantumkan :

- Ketentuan Umum

1. Definisi-definisi yang akan digunakan harus mengikuti definisi-definisi yang terdapat dalam UNCLOS Tahun 1982.

Definisi landas kontinen yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan definisi landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. Definisi yang terdapat dalam undang-undang tersebut sangat sempit dan tidak dapat dikembangkan, sedangkan definisi dalam UNCLOS lebih memungkinkan perluasan wilayah landas kontinen Indonesia. Oleh karena itu definisi tersebut perlu segera diubah. Berikut ini beberapa definisi landas kontinen:

Landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp/1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Konvensi UNCLOS 1958 mengakui hak berdaulat negara pantai atas landas kontinen sampai kedalaman 200 meter atau di luar batas itu sampai kedalaman air yang memungkinkan eksploitasi sumber-sumber alam dari daerah tersebut [Pasal 1 dan 2].

Menurut UNCLOS 1982 landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut [Pasal 76].

58

Dari definisi diatas, terlihat perbedaan signifikan dalam menentukan batas terluar landas kontinen antara UNCLOS 1958 dengan UNCLOS 1982, yaitu UNCLOS 1958 mendasarkan pada kedalaman 200 meter dan kemampuan eksploitasi, sedangkan UNCLOS 1982 berdasarkan jarak dari garis pangkal laut teritorial.

Pada saat perumusan UNCLOS 1958 teknik pengeboran minyak lepas pantai belum melebihi kedalaman 50 meter, sehingga penetapan batas terluar landas kontinen atas dasar ukuran geologis yakni batas kedalaman 200 meter hingga kedalaman air yang masih memungkinkan eksploitasi kekayaan alamnya dianggap sebagai penyelesaian yang memuaskan. Namun perkiraan itu keliru, karena perkembangan teknologi pengeboran maju sedemikian pesatnya sampai beberapa ribu meter, seperti keberhasilan Ekspedisi Glomar Challenger tahun 1965. UNCLOS 1982 yang mendasarkan pada kemampuan eksploitasi sumberdaya alam dipertanyakan dan tidak lagi memuaskan semua pihak.

Definisi-definisi dalam undang-undang nasional diusahakan sesuai dengan UNCLOS, akan tetapi apabila ada perbedaan dengan ketentuan dalam UNCLOS diusahakan tidak mengubah substansinya. Hal ini dilakukan agar undang-undang nasional, walaupun mengikuti ketentuan internasional, tetap juga mengikuti teknik penyusunan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Penggunaan istilah dalam perubahan/penggantian Undang-Undang tentang Landas Kontinen tidak boleh rancu dengan berbagai penggunaan istilah dalam ketentuan UNCLOS sebab ada perbedaan antara wilayah dengan pengertian teritori dengan yurisdiksi, seperti penggunaan istilah Zone (continues Zone), teritori, area dan sebagainya, sebab landas kontinen bukanlah bagian dari wilayah teritorial.

**2.** **Istilah Eksplorasi dan Eksploitasi**

Istilah kegiatan eksplotasi dan eksplorasi dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara tidak digunakan lagi tetapi digunakan istilah Izin Eksplorasi dan Izin Operasi. Padahal dalam UNCLOS istilah eksplorasi dan eksploitasi sudah lazim digunakan. Untuk kepentingan harmonisasi perlu dilakukan penyelarasan istilah

59

3. Asas/Prinsip yang digunakan.

1. Asas yang digunakan hendaknya sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dalam memanfaatkan landas kontinen.

2. Asas-asas dalam UNCLOS 1982 dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penentuan asas perubahan UU No.1 Tahun 1973.

**- Batang Tubuh**

1. Dalam batang tubuh RUU perubahan UU NO.1 Tahun 1973 harus dimasukkan mengenai :

a. Status Hukum Landas Kontinen

Status hukum landas kontinen Indonesia saat ini beragam, ada yang sudah terjadi persetujuan dengan negara tetangga, ada yang masih dalam proses, dan ada yang belum dalam klaim nasional. Berbagai kondisi tersebut harus dipertimbangkan agar tidak menyusahkan ketika Indonesia melakukan perundingan dengan negara lain.

b. Penelitian Ilmiah yang boleh dan tidak boleh dilakukan

c. Akibat pencemaran laut dari aktivitas di landas kontinen, siapa yang harus   
bertanggung jawab

Eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen terutama untuk barang tambang, minyak   
dan gas sangat mungkin menyebabkan terjadinya pencemaran laut sekitarnya.   
Pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran laut di sekitar landas kontinen   
perlu diatur agar jelas setiap pihak tanggungjawabnya.

d. Perizinan untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi

Perizinan untuk eksplorasi dan eksploitsi di landas kontinen bersifat multi sektoral karena melibatkan Kementerian Eksplorasi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan (khususnya Bea Cukai), Kementerian Hukum (khususnya Keimigrasian), Kementerian Pertahanan (sebagai pengamanan dan penegakan hukumnya), Kementerian Lingkungan Hidup (dalam masalah pencemaran) dan lain sebagainya.

60

e. Penegakan hukumnya

Penegakan hukum di Landas Kontinen Indonesia yang memungkinkan hany dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, akan tetapi perlu pula dibuat mekanisme karena pelanggaran yurisdiksi di landas kontinen harus sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional.

f. Pemasangan pipa, kabel laut dan alat komunikasi lainnya di landas kontinen.

Di Landas Kontinen banyak hak dari negara lain yang tidak boleh dilarang untuk beraktivitas terutama di perairannya, termasuk pula dalam kegiatan untuk pemasangan pipa, kabel laut dan sebagainya. Negara pengklaim landas kontinen hanya boleh mengatur agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak merusak atau mengganggu kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang akan dan telah dilakukan.

**- Sanksi**

1. Sanksi Administrasi

2. Sanksi Pidana kalau memungkinkan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan   
UNCLOS Tahun 1982.

61

**BAB VI**

**PENUTUP**

**A. Simpulan**

1. Perubahan atau penggantian UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen sangat penting sebab berkaitan dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pantai yang telah meratifikasi UNCLOS tahun 1982 serta kemungkinan Indonesia untuk memperluas klaim landas kontinen di bagian barat pulau Sumatera, bagian utara pulau Papua dan bagian selatan Nusa Tenggara..

2. Sebagai peraturan yang sarat dengan bukti-bukti ilmiah, klaim terhadap area landas kontinen Indonesia telah didukung dengan hasil penelitian yang oleh berbagai instansi dengan koordinator Bakosurtanal dan dari hasil penelitian ilmiah kelautan tersebut telah diserahkan kepada pihak yang berkompeten di organisasi internasional.

3. Hampir semua ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1973 perlu dilakukan perubahan dan penambahan secara cukup signifikan disesuaikan dengan ketentuan UNCLOS dan peraturan perundang-undangan nasional terkait.

4. Ketentuan-ketentuan yang perlu ditambahkan dalam perubahan atau penggantian UU No.1 Tahun 1973 antara lain : ketentuan istilah landas kontinen, perizinan eksplorasi dan eksploitasi, penelitian ilmiah kelautan, pencemaran akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen, masalah penegakan hukumnya dan lain-lain serta dampak dari perubahan landas kontinen lebih kepada peraturan pelaksanaannya karena perlu penyesuaian dengan ketentuan UNCLOS

5. Sasarannya memberikan arah pengaturan bagi perancangan penyusunan perubahan/penggantian Undang-Undang No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen.

62

**B. Saran/Rekomendasi**

1 Berhubung banyaknya perubahan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1973 yang perlu   
dilakukan, maka sebaiknya UU No.1 tahun 1973 dilakukan penggantian bukan   
perubahan.

2 Pengganti UU tentang Landas Kontinen perlu segera dilakukan agar kemungkinan   
klaim Indonesia atas landas kontinen bisa segera dilakukan. Untuk itu Rancangan   
Undang-Undang tentang Landas Kontinen perlu dimasukkan dalam Prioritas   
Prolegnas Tahun 2012.

3 Hasil penelitian yang telah ada dan dapat dijadikan dasar bagi klaim landas kontinen   
Indonesia di area bagian barat pulau Sumatera perlu dilanjutkan dengan area lainnya.   
Untuk itu diperlukan adanya pihak yang mengkoordinasikannya serta disediakan dana   
yang cukup baik untuk kepentingan penelitian ilmiah kelautan maupun untuk   
kepentingan eksplorasi dan eksploitas sumber dayanya.

4 Penggantian RUU tentang Landas Kontinen perlu dilakukan lebih cermat untuk itu   
diharapkan adanya penyusunan naskah akademik tentang Landas Kontinen secara   
berkelanjutan agar dapat lebih komprehensif.

63

RANCANGAN (AKADEMIS)

PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR… TAHUN…

TENTANG

LANDAS KONTINEN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum laut internasional terutama setelah diratifikasinya Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi United Nations on the Law of the Sea;

b. bahwa untuk kepentingan nasional dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam di Landas Kontinen Indonesia perlu diatur secara menyeluruh dalam Undang-undangtentang landas Kontinen;

c. bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut mengandung beberapa ketentuan mengenai landas kontinen yang merupakan pengembangan atas Konvensi Jenawa Tahun 1985 tentang Landas Kontinen yang menjadi dasar bagi penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973;

d. bahwa berhubungan dengan itu, untuk memantapkan landasan hukum yang mengatur ruang lingkup Landas Kontinen Indonesia yang meliputi hak berdaulat, hak eksklusif, yurisdiksi, hak-hak dan kewajiban serta kegiatan di Landas Kontinen Indonesia dalam rangka Pembangunan Nasional

64

yang berdasarkan Wawasan Nusantara, perlu menetapkan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 25A dan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319).

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

65

(Beberapa ketentuan umum yang harus ada)

**Pasal**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tepian Kontinen adalah kelanjutan alamiah dari daratan Indonesia yang berada di bawah permukaan air, yang terdiri dariatas dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran (shelf), lereng (slope) dan tanjakan (rise) kontinen. Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudra dalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah di bawahnya;

2. Sumber Daya Alam meliputi mineral dan Sumber Daya Alam Non Hayati Lainnya yang terdapat di Landas Kontinen, dan organisme hayati yang tergolong jenis sedenter, yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat di panen berada dalam hubungan fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya;

3. Eksplorasi adalah setiap penyelidikan yang bertujuan untuk menetapkan lebih teliti dan seksama adanya sifat dan letakan sumber daya alam;

4. Eksploitasi Sumber Daya Alam adalah segala bentuk usaha untuk menghasilkan sumber daya alam;

5. Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh data dan informasi dari landas kontinen Indonesia dengan tujuan untuk menambah pengetahuan ilmiah tentang landas kontinen demi kepentingan umat manusia. Penelitian ilmiah secara sistematis tentang kolom air.

6. Pulau buatan instalasi dan bangunan lainnya adalah setiap bangunan atau instalasi yang dipakai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan penelitian ilmiah kelautan di Landas Kontinen Indonesia.

7. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut di landas kontinen.

66

8. Pencemaran Laut di Landas Kontinen adalah setiap pencemaran yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan di Landas Kontinen Indonesia.

9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah adalah Pemerintah Rrepublik Indonesia

10 Dumping adalah setiap pembuangan dengan sengaja limbah atau benda lainnya ke landas kontinen.

11. Garis Pangkal Kepulauan adalah garis pangkal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (karena kesulitan dalam penguraiannya).

12. Konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut adalah the United Nationsnal Convention on the Law of Sea sebagaimana telah diratifikasi dengan UU no 17 tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318).

**BAB II**

**Pasal**

Asas

Ketentuan tentang asas dapat dimasukkan atau tidak, tetapi paling tidak dalam RUU tentang Landas Kontinen perlu dimasukan mengenai :

Asas Wawasan Nusantara

Asas Manfaat

Asas Ketahanan Nasional

**STATUS HUKUM LANDAS KONTINEN INDONESIA**

**Pasal**

67

(1) Landas kontinen Indonesia meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Alternatif :

Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman. (UU 43/2008)

(2) a. Dalam hal pinggiran terluar tepian kontinen melebihi jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan , maka bata terluar tepian kontinen yang di tetapkan sebagai berikut:

i. suatu garis yang di tarik sesuai dengan ayat (5) dengan menunjuk pada titik-titik tetap terluar di mana ketebalan batuan adalah paling sedikit 1 prosen dari jarak terdekat antara titik-titik tersebut dari kaki kontinen; atau

ii. suatu garis yang di tarik sesuai dengan ayat (5) dengan menunjuk pada titik-titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen,

b. Dalam hal tidak terdapat bukti yang bertentangan, kaki lereng kontinen harus di tetapkan sebagai titik perubahan maksimum dalam tanjakan pada kakinya.

(3) Titik-titik tetap tersebut yang merupakan garis batas luar landas kontinen Indoneisa pada dasar laut, yang di tarik sesuai dengan ayat (2) huruf a, i dan ii atau tidak melebihi 350 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan atau tidak melebihi 100 mil laut dari batas kedalaman 2500 meter, yang merupakan suatu garis yang menghubungkan batas kedalaman 2500 meter.

(4) pada bukti-bukti dasar laut, batas luar landas kontinen Indonesia tidak melebihi 350 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan. Ketentuan ayat ini tidak berlaku garis elevasi-elevasi dasar laut yang merupakan bagian-bagian alamiah tepian kontinen, seperti peralatan, tanjakan, puncak, ketinggian yang datar dan puncak gunung yang bulat.

68

(5) Dalam hal landas kontinen diukur dari garis pangkal kepulauan, batas luar landas kontinen Indonesia di tetapkan dengan menarik garis-garis lurus yang panjangnya tidak melebihi 60 mil laut yang menghubungkan titik-titik tetap yang di tetapkan dengan menarik koordinat-koordinay lintang dan bujur.

(6) Informasi mengenai batas-batas landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan, harus di sampaikan kepada Komisi Batas-batas Landas Kontinen[O1] .

(7) Peta-peta, keterangan yang relevan termasuk data geodetic, yang secara permanen menggambarkan batas luar landas kontinen Indonesia harus di deposit pada Sekretaris Jendral Preserikanatan Bangsa-bangsa.

(8) Data Informasi Kelautan sangat penting untuk mengetahui situasi, kondisi dan kandungan sumber daya yang ada di laut termasuk di landas kontinen

**Status Hukum Landas Kontinen Dengan Negara Tetangga**

**Pasal**

(1) Apabila landas kontinen Indonesia tumpang tindih dengan landas kontinen Negara-negara tetangga yang saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara tersebut ditetapkan bedasarkan persetujuan antara Indonesia dengan Negara-negara tetangga yang bersangkutan.

(2) Selama persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, apabila tidak terdapat keadaan khusus yang perlu di pertimbangkan, batas landas kontinen antara Indonesia dengan Negara tetangga yang bersangkutan adalah garis tengah yang titik-titiknya sama jarak antara garis pangkal kepulauan dan garis-garis pangkal laut teritorial Negara tetangga tersebut.

(3) Selama persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai dan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Indonesia dengan negara tetangga yang bersangkutan dapat mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis mengenai landas kontinen yang tumpang tindih tersebut, dengan ketentuan bahwa pengaturan sementara tersebut

69

tidak akan merupakan hambatan bagi tercapainya persetujuan mengenai penetapan garis batas landas kontinen tersebut.

(4) Persetujuan yang telah ada antara Indonesia dengan Negara-negara tetangga mengenai garis batas landas kontinen sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap berlaku dan/atau dihormatidi hormati.

**Yurisdiksi Di Landas Kontinen**

**Pasal**

Di landas kontinen Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

a. hak berdaulat yang bersifat eksklusif [O2] untuk melakukan eksplorasi landas kontinen dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di landas kontinen tersebut;

b. hal eksklusif untuk mengizinkan dan mengatur pengeboran terkait kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen untuk segala keperluan;

c. yurisdiksi yang berhubungan dengan:

1. Pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya;

2. Penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen;

3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Pasal

70

(1) Status hukum perairan atau ruang udara di atas landas kontinen Indonesia dialaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

(2) kebebasan pelayaran dan penerbangan di laut dan udara di atas landas kontinen Indonesia tetap di hormati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

(hal ini dimaksudkan agar semua peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi hukum laut internasional dapat dijadikan pedoman)

Pasal

(1) kebebasan Kebebasan pemasangan kabel dan pipa bwah laut di landas kontinen Indonesia tetap dihormati.

(2) pemasangan kabel dan pipa laut sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

**BAB III**

**KEGIATAN-KEGIATAN DI LANDAS KONTINEN**

**Pasal**

Kegiatan eksplorasi landas kontinen Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di landas kontinen Indoneisa hanya dapat di laksanakan berdasarkan izin pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal

(1) Untuk melaksanakan eksplorasi dan atau eksploitasi sebagaimana di maksud pada Pasal 7, di landas kontinen Indonesia dapat :

a. dibangun, digunakan dan dipelihara pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya;

71

b. digunakan kapal-kapal dan alat-alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi.

(2) Pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain daripada kepentingan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam kecuali dengan izin Pemerintah.

(3) Pemilik pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:

a. memasang dan memelihara sarana bantu navigasi yang menunjukan adanya pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya tersebut serta memberitahukan secara resmi kepada instansi yang berwenang mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya tersebut;

b. memindahkan setiap pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya tersebut yang ditinggalkan atau tidak digunakan lagi, untuk menjamin keselamatan pelayaran dengan memperhatikan standar internasional yang berlaku. Pemindahan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perikanan dan kelestarian lingkungan laut;

c. dalam hal instalasi atau bangunan lainnya tersebut tidak dipindahkan secara keseluruhan, pemilik harus memberi tanda dan memberitahukan secara resmi kepada instansi yang berwenang mengenai kedalaman, posisi dan ukuran dari bagian dari pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya tersebut yang tidak dipindahkan.

(4) Pemerintah mengumumkan sebagaimana mestinya tentang:

a. adanya pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b. mengumumkan kedalaman, posisi dan ukuran dari instalasi atau bangunan yang tidak di bongkar secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

72

(5) Syarat-syarat dan tata cara pembangunan, penggunaan, pemeliharaan dan pemindahan pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya serta penggunaan kapal dan alat-alat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal

(1) Pemerintah dapat menetapkan daerah terlarang di sekitar pulau buatan, instalasi, bangunan lainnya, kapal dan alat-alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, di daerah terlarang tersebut Pemerintah dapat mengambil tindakan- tindakan yang diperlukan baik untuk menjamin keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, kapal dan alat-alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam maupun keselamatan pelayaran.

(2) Lebar daerah terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 500 meter dihitung dari setiap titik terluar pda pulau buatan, instalasi, bangunan lainnya, kapal dan alat-alat lainya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

(3) Di Zona Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kapal pihak ketiga dilarang berlayar dan harus mematuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran di sekitar pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya .

(4) Di samping Zona keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah dapat menetapkan suatu daerah terbatas yang lebarnya tidak melebihi 1.250 meter dihitung dari titik-titik terluar daerah terlarang tersebut, di daerah terbatas kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membongkar sauh.

(5) Pemerintah mengumumkan sebagaimana mestinya mengenai luasnya Zona Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Zona Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal

(1) Badan atau lembaga atau Setiap orang yang bermaksud melakukan suatu penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah.

73

(2) Pemerintah dapat menolak permohonan izin suatu penelitian ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penelitian ilmiah kelautan tersebut:

a. dimaksudkan bukan untuk tujuan damai atau bukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka kemanusiaan;

b. mempunyai kaitan langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen Indonesia;

c. mencakup kegiatan pengeboran di landas kontinen Indonesia, pemakaian bahan-bahan peledak atau bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan laut;

d. mencakup kegiatan pembuatan, pengoperasian atau penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

e. memuat keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian ilmiah kelautan tersebut atau badan atau lembaga yang melakukan penelitian ilmiah kelautan tersebut belum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap pemerintah mengenai suatu penelitian ilmiah kelautan yang dilakukan sebelumnya.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (2), Pemerintah tidak boleh menggunakan kewenangannya menolak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b suatu permohonan izin untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut dihitung dari garis pangkal kepulauan, jika penelitian ilmiah tersebut dilakukan di luar daerah-daerah tertentu yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai daerah di mana eksplorasi dan atau kegiatan-kegiatan eksplorasi akan di lakukan dalam waktu dekat.

(4) Untuk keperluan efektivitas penelitian kelautan termasuk di Landas Kontinen Indonesia Pemerintah dapat menentukan lembaga atau badan yang berfungsi sebagai koordinator.

Pasal

74

Badan atau lembaga yang bermaksud melakukan penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia, dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum waktu yang direncanakan bagi penelitian ilmiah kelautan tersebut, harus menyampaikan suatu uraian lengkap mengenai:

a. Sifat dan tujuan proyek tersebut;

b. metode dan peralatan yang digunakan, termasuk nama, tonase, tipe serta kelas kendaraan air dan uraian mengenai peralatan ilmiah.

c. posisi geografis yang tepat dari dari daerah di mana penelitian tersebut akan deselenggarakan;

d. pekiraan tanggal kedatangan pertama dan keberangkana terakhir kapal penelitian, atau tanggal penempatan dan penyingkiran peralatan tersebut;

e. nama lembaga sponsor, direkturnya, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas penelitian tersebut;

f. sejauhmana Pemerintah dapat berperan serta atau diwakili dalam penelitian tersebut.

Pasal

(1) Badan atau lembaga yang bermaksud melakukan penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. menjamin bahwa, jika Pemerintah menghendaki, Pemerintah dapat berperan serta atau diwakili dalam penelitian ilmiah kelautan tersebut, terutama di atas kapal penelitian dan kapal atau instalasi penelitian ilmiah lainnya, tanpa keharusan untuk membayar imbalan kepada ilmuwan Indonesia yang ikut serta dalam penelitian tersebut dan tanpa keharusan untuk member sumbangan bagi biaya penelitian ilmiah kelautan tersebut;

b. memberikan laporan sementara secepat mungkin, dan hasil akhir serta kesimpulan–kesimpulan setelah penelitian tersebut dilaksanakan;

75

c. bersedia memberikan akses bagi Pemerintah atas segala data dan contoh yang diperoleh dari penelitian ilmiah kelautan tersebut,serta memberikan data yang dapat disalin dan contoh yang dapat di pecah-pecah tanpa mengurangi nilai ilmiahnya;

d. bersedia memberikan kepada Pemerintah suatu penilaian mengenai data , contoh dan hasil tersebut atau memberikan bantuan dalam melakukan penilaian atau penafsirannya;

e. menjamin,dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bahwa hasil-hasil penelitian tersebut dapat di buat tersedia secepat mungkin bagi masyarakat internasional melalui saluran-saluran nasional atau internasionla yang tepat;

f. segera memberitahukan kepada Pemerintah setiap perubahan utama dalam program penelitian tersebut;

g. kecuali apabila disepakati lain, memindahkan instalasi penelitian ilmiah atau peralatannya apabila penelitian tersebut telah selesai .

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi keharusan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), termasuk keharusan untuk memenuhi syarat memperoleh persetujuan Pemerintah sebelum hasil dari suatu penelitian yang mempunyai arti langsung bagi eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam dapat dibuat tersedia bagi masyarakat internasional.

Pasal

Badan atau lembaga yang bermaksud menyelenggarakan penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia dapat mulai melakukan penelitian tersebut 6 (enam) bulan sesudah tanggal penyampaian uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kecuali jika 4 (empat) bulan setelah diterima uraian tersebut, Pemerintah telah memberitahukan kepada badan atau lembaga yang akan menyelenggarakan penelitian tersebut bahwa:

a. Pemerintah tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau

76

b. uraian yang diberikan oleh badan atau lembaga tersebut mengenai sifat dan tujuan penelitian tidak sesuai dengan fakta-fakta yang nyata;

c. Pemerintah memerlukan penjelasan tambahan yang bertalian dengan uraian dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12;

d. badan atau lembaga tersebut belum memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam penelitian ilmiah kelautan yang sebelumnya.

Pasal

(1) Pemerintah dapat menangguhkan setiap penelitian ilmiah kelautan yang sedang berlangsung di landas kontinen Indonesia apabila:

Penelitian tersebut tidak dilakukan sesuai dengan informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau

badan atau lembaga yang melakukan penelitian ilmiah kelautan tersebut gagal dalam memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Pemerintah dapat menghentikan setiap penelitian ilmiah kelautan apabila tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang mengakibatkan timbulnya perubahan utama dalam penelitian ilmiah kelautan tersebut.

(3) Pemerintah dapat pula menghentikan penelitian ilmiah kelautan apabila salah satu dari keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di betulkan dalam tenggang waktu yang wajar.

(4) Badan atau lembaga yang memperoleh izin utuk melakukan suatu penelitian ilmiah kelautan harus menangguhkan atau menghentikan penelitian ilmiah kelautan tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Pemerintah.

(5) Suatu perintah penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicabut oleh Pemerintah dan penelitian ilmiah kelautan tersebut diperbolehkan untuk berlangsung terus jika

77

badan atau lembaga yang melakukan penelitian ilmiah kelautan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal

(1) Penempatan dan penggunaan setiap jenis instalasi atau peralaan penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia hanya dapat dilakuakan dengan izin Pemerintah.

(2) Instalasi atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki status sebagai pulau.Instalasi atau peralatan tersebut tidak memiliki laut teritorial dan adanya instalasi-instalasi atau peralatan di suatu tempat tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial.

(3) Zona keselamatan dengan lebar yang wajar dan tidak melebihi 500 meter luasnya dapat diadakan di sekeliling instalasi penelitian ilmiah kelautan tersebut. Semua kendaraan air harus mengindahkan zona keselamatan tersebut.

(4) Penetapan dan penggunaan setiap jenis instalasi atau peralatan penelitian ilmiah kelautan tidak boleh merupakan halangan bagi rute pelayaran internasional yang sudah ada.

(5) Instalasi dan peralatan penelitian ilmiah kelautan tersebut oleh pemiliknya harus diberi tanda pengenal yang menunjukan Negara registrasi atau organisasi internasional yang memilikinya dan harus memiliki tanda bahaya yang telah disepakti secara internasional yang cukup untuk menjamin keselamatan di laut dan keselamatan navigasi diudara dengan memperhatikan ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh organisasi internasional yang berwenang.

Pasal

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 :

Penetapan lokasi dan arah jalur pemasangan kabel dan pipa bawah laut di landas kontinen Indonesia, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah; dan

78

Dalam pemasangan kabel dan pipa bawah laut yang baru di landas kontinen Indonesia, harus diindahkan kabel dan pipa bawah laut yang sudah ada , khususnya tidak boleh menghalangi kemungkinan perbaikan dan atau penggantian kabel dan pipa bawah laut tersebut.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan untuk menetapkan syarat-syarat pemasangan dan atau pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut yang masuk ke wilayah daratan atau ke perairan Indonesia atau mempengaruhi yurisdiksi Republik Indoneisa atas kabel dan pipa bawah laut yang dipasang atau digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen Indonesia atau untuk pengoperasian pulau buatan, instalasi dan bangunan di landas kontinen Indonesia.

Pasal

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kapal yang tenggelam yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran harus diberi tanda-tanda yang jelas sebagaimana lazimnya yang berlaku dibidang pelayaran.

Pasal

(1) Setiap orang atau badan hokum yang melakukan kegiatan di landas kontinen Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab ini , berkewajiban melakukan upaya untuk :

Mencegah , mengurangi , dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta pembangunan, penggunaan dan pemeliharaan pulau-pulau buatan , instalasi dan bangunan lainnya di landas kontinen Indonensia;

Mencegah agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan pencemaran di wilayah negara lain dan zona ekonomi eksklusifnya;

Mencegah agar pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut tidak menyebar keluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Mencegah, menanggulangi dan mengendalikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan laut sebagai akibat dari penggunaan teknologi untuk kegiatan dilandas kontinen Indonesia; dan

Mencegah pemasukan baik dengan sengaja atau tidak jenis flora atau fauna, asing atau baru, ke landas kontinen Indonesia yang mengakibatkan perubahan penting dan merugikan bagi lingkungan laut.

79

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengindahkan ketentuan- ketentuan dan standar-standar internasional serta praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan secara internasional.

Pasal

(1) Setiap orang yang mengetahui terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan di landas kontinen Indonesia wajib segera melporkannya kepada instansi yang berwenang.

(2) Dalam rangka menanggulangi dan mengendalikan pencemaran yang timbul sebagai akibat kegiatan landas kontinen Indonesia, Pemerintah menetapkan ketentuan tentang penanggulangan darurat untuk menanggulangi dan mengendalikan pencemaran tersebut serta mencegah agar pencemaran tersebut tidak menyebar keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wilayah Negara lain dan zona ekonomi eksklusifnya dan laut lepas.

(3) Apabila pemerintah mengetahui adanya keadaan dimana sebagai akibat dari kegiatan di landas kontinen Indonesia, lingkungan laut di atas landas kontinen Indonesia dalam ambang kerusakan atau telah rusak, Pemerintah memberitahukan kepada Negara lain yang menurut perkiraannya sangat mungkin akan terancam oleh kerusakan tersebut dan kepada organisasi internasional yang berwenang.

(4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dengan pemerintah Negara lain yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan masing-masing, beserta organisasi internasional yang berwenang bekerja sama sejauh mungkin untuk menghilangakan akibat pencemaran dan mencegah atau mengurangi kerusakan yang timbul. Untuk tujuan itu pemerintah bersama-sama dengan pemerintah Negara yang bersangkutan mengembangkan pola penanggulangan darurat untuk menanggulangi pencemaran lingkungan laut tersebut.

Pasal

(1) Kecuali dengan izin pemerintah, setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan damping dilandas kontinen Indonesia.

80

(2) Pemerintah dapat memberikan izin untuk melakukan damping di landas kontinen Indonesia dengan ketentuan bahwa:

Damping tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan, standar-standar, internasional dan regional serta praktek-praktek prosedur yang dianjurkan secara internasional dan regional;

Jika damping tersebut bagi Negara lain yang karena letak geografisnya dapat menimbulkan dampak negatif, hal tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebagaimana mestinya dengan Negara yang bersangkutan.

(3) Pemberian izin untuk melakukan damping di landas kontinen Indonesia tidak menghapus kewajiban penerima izin untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan laut akibat damping yang dilakukannya.

(4) Setiap kapal Indonesia dilarang mengangkut limbah untuk didampingi di di Landas Kontinen Indonesia, kecuali untuk damping tersebut telah diperoleh izin yang diperlukan untuk itu.

(5) Setiap kapal berbendera asing dilarang mengangkut limbah dari pelabuhan Indonesia untuk didampingi di Landas Kontinen Indonesia kecuali untuk damping tersebut telah diperoleh izin.

(6) Pemerintah dapat menetapkan atau menunjuk daerah-daerah tertentu di Landas Kontinen Indonesia sebagai kawasan damping.

(7) Dengan peraturan pemerintah ditetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengelolaan kawasan damping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara perizinan serta tata cara pelaksanaan damping di kawasan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal

(1) Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi Landas Kontinen Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam non hayati di Landas Kontinen Indonesia harus di indahkan kepentingan-kepentingan antara lain:

81

Pertahanan keamanan ;

Kelestarian Sumber daya alam hayati;

Telekomunikasi, transmisi listrik, kabel dan pipa bawah laut;

Kebebasan Pelayaran;

Penelitian ilmiah kelautan;

Cagar alam; dan

Kelestarian lingkungan laut.

(2) Dalam melakukan penelitian ilmiah kelautan di Landas Kontinen Indonesia harus diindahkan kepentingan-kepentingan antara lain:

Pertahanan keamanan;

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non hayati di Landas Kontinen Indonesia;

Pelayaran;

Telekomunikasi, transmisi listrik, kabel dan pipa bawah laut;

cagar alam; dan

kelestarian lingkungan laut.

(3) Dalam melaksanakan pemasangan kabel dan pipa bawah laut di Landas Kontinen Indonesia harus diindahkan kepentingan-kepentingan antara lain:

a. Pertahanan keamanan;

b. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non hayati di Landas Kontinen Indonesia;

c. Penelitian ilmiah kelautan;

d. Pelayaran;

e. Cagar alam; dan

f. Kelestarian lingkungan laut.

82

(4) Apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pemerintah dapat menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan kegiatan tersebut atau dapat mencabut izin yang bertalian dengan kegiatan tersebut.

**BAB IV**

**TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI**

**Pasal**

Barangsiapa Setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang bertalian dengan pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya, kapal atau alat-alat perlengkapan lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta kabel dan pipa bawah laut di Landasan Kontinen Indonesia dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik pulau buatan instalasi atau bangunan lainnya, memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemilik tersebut, pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya, kapal atau alat-alat perlengkapan lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta kabel dan pipa bawah laut tersebut.

Pasal

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sbarangsiapa etiap orang di Landas Kontinen Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian ilmiah kelautan dan mengakibatkan kerugian wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, barangsiapa melakukan kegiatan di Landas Kontinen Indonesia dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.

(2) Dikecualikan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena:

83

Akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya; dan kerusakan yang seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.

(3) Bentuk, jenis, dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis,

(4) Ketentuan tentang prosedur ganti rugi, tata cara penelitian ekologis dan penuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

**BAB V**

**PENEGAKAN HUKUM**

**Pasal**

Terhadap setiap perbuatan dan/atau peristiwa yang terjadi di pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya, kapal dan alat-alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Landas Kontinen Indonesia, berlaku hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pasal

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak eksklusif dan yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, aparatur penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

- penangkapan terhadap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan pelanggaran di Landas Kontinen Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal dan/atau orang sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;

84

- penyerahan kapal dan/atau orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeur; dan penahanan dalam kapal disamakan dengan penahanan rumah.

Pasal

(1) Kapal perang Republik Indonesia dapat melakukan pengejaran terus menerus dalam rangka menghentikan dan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terhadap kapal asing bukan kapal perang yang diduga telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan ini atau Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Tindakan pengejaran terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sampai batas terluar laut teritorial negara lain, kecuali jika dengan negara lain tersebut telah ada persetujuan yang memungkinkan dilakukannya pengejaran terus menerus hingga memasuki laut teritorial Negara tersebut.

Pasal

(1) Aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Landas Kontinen Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu berhubung dengan kekhususan tugasnya dapat diberikan kewenahan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini;

(3) Penuntut Umum adalah Jaksa dari Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali jika ditetapkan lain oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;

(4) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan di mana diserahkan kapal dan/atau orang yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a.

85

Pasal

(1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan atau orang yang ditangkap kerena didakwa melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di Landas Kontinen Indonesia, dapat dilakukaan setiap waktu sebelum ada putusan dari pengadilan negeri yang berwenang.

(2) Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jamianan yang layak, yang penetapannya dilakuakan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang.

(3) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di siding, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan surat amar putusan disampaikan kepada terpidana.

(4) Dalam keadaan sebagimana dimaksud pada ayat (3) uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian digunakan untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan sebagaimana lagi digunakan sebagai jaminan untuk pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

**BAB VI**

**KETENTUAN PIDANA**

Dalam hal pembuatan ketentuan pidana perlu diperhatikan ketentuan sanksi dalam UNCLOS 1982, mana yang boleh dengan pidana mana yang tidak (hanya ganti rugi saja, misalnya tidak boleh ditahan).

Pasal

(1) Barangsiapa setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alamn Landas Kontinen Indonesia bertentangan dengan Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. [100.000.000.000](http://100.000.000.000),00 (sepuluh seratus milyar rupiah).

86

(2) Jika sesudah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kapal atau alat perlengkapan lainnya serta atau hasil kegiatannya dihancurkan atau disembunyikan dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalangi atau mempersulit pemeriksaan atau penuntutan, maka pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah sepertiganya.

(3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh orang lain daripada orang yang dimaksud dalam ayat (1), maka orang tersebut dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. [50.000.000.000](http://50.000.000.000),00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal

(1) Barang siapaSetiap orang yang membangun, menggunakan dan memelihara pulau-pulau   
buatan, instalasi atau bangunan lainnya di Landas Kontinen Indonesia bertentangan dengan pasal 8,   
dipidana dengan penjara selama-lamanya 6 (enam) tahu penjara atau denda paling banyak Rp. [5.000.000.000](http://5.000.000.000),00 (lima milyar rupiah).

(2) Jika sesudah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya dihancurkan atau disembunyikan dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalangi atau mempersulit pemeriksaan atau penuntutan , maka pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sepertiga.

(3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang yang lain daripada orang yang dimaksud pada ayat (1), maka orang tersebut dipidana sengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. [2.000.000.000](http://2.000.000.000),00 (dua milyar rupiah).

Pasal

(1) Barang siapaSetiap orang yang dengan sengaja memasuki tanpa izin daerah terlarang sebagimana termaksud pada Pasal 9 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun, dan bila masuknya seseorang ke daerah terlarang tersebut menimbulkan kerusakan pada pulau-pulau buatan, instalasi atau bangunan lainya yang digunakan sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

87

(2) Jika sesudah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal atau alat perlengkapan lainnya atau hasil kegiatannya dihancurkan atau disembunyikan dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalangi atau mempersulit pemeriksaan atau penuntunan, maka pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sepertiga.

(3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang yang lain daripada dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. [2.000.000.000](http://2.000.000.000),00 (dua milyar rupiah).

Pasal

Barang siapaSetiap orang dengan tidak sengaja memasuki tanpa izin daerah terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dan bila masuknya seseorang tersebut menimbulkan keriguan pada pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya, kapal dan alat perlengkapan lainnya yang digunakan sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal

(1) Barang siapaSetiap orang melakukan penelitian ilmiah kelautan di Landas Kontinen Indonesia bertentangan dengan Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika sesudah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal atau alat perlengkapan lainnya serta atau hasil kegiatannya dihancurkan atau disembunyikan dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalangi atau mempersulit pemeriksaan atau penuntutan, maka pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

(3) Dalam hal tindakan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang yang lain daripada yang dimaksud pada ayat (1), maka orang tersebut dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal

88

Barangsiapa Setiap orang dalam melakuakan penelitian ilmiah kelautan di Landas Kontinen Indonesia , melakukan penelitian ilmiah kelautan tentang kolom air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin Pemerintah dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tengtang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan ………. (copy paste dari UU ZEE).

Pasal

Barangsiapa Setiap oarang yang telah memperoleh izin penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. [1.000.000.000](http://1.000.000.000),00 (satu milyar rupiah).

Pasal

(1) Barangsiapa Setiap orang menempatkan dan atau menggunakan instalasi atau peralatan penelitian ilmiah kelautan di Landas Kontinen Indonesia bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika sesudah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) instalasi atau peralatan penelitian ilmiah kelautan tersebut dihancurkan atau disembunyikan dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau menghalangi atau mempersulit pemeriksaan atau penuntutan, maka pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah dengan sepertiga.

(3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh orang yang lain daripada yang dimaksud pada ayat (1), maka oeang tersebut dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

89

Pasal

Barangsiapa Setiap orang yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dan menimbulkan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan Negara, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai subversi.

Pasal

Barangsiapa Setiap orang yang dengan sengaja atau dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan kabel dan pipa bawah laut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal

(1) Barangsiapa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan untuk memutuskan atau merusak karena kelalaian yang sangat mengakibatkan terputus atau rusak kabel bawah laut yang terpasang di Landas Kontinen atau di laut lepas sedemikian rupa sehingga memutuskan atau menghalangi komunikasi telegram atau telepon atau dengan sengaja melakukan perbuatan memutuskan atau merusak atau dengan kelalaian yang sangat mengakibatkan terputus atau rusak pipa atau kabel listrik tegangan tinggi bawah laut, yang terpasang di Landas Kontinen atau laut lepas, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila perbuatan atau kelalaian tersebut terjadi karena bertindak dengan jutuan yang sah untuk menyelamatkan nyawa atau kendaraannya setelah dilakukan segala upaya pencegahan untuk menghindarkan terjadinya pemutusan atau kerusakan tersebut.

Pasal

Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 serta atau

90

hasil kegiatan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, dirampas untuk Negara.

Pasal

Barangsiapa Setiap orang melakukan dengan sengaja tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan laut di Landas Kontinen Indonesia diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan laut.

Pasal

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 adalah pelanggaran.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 2994, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua peratuaran perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini dan selama belum dikeluarkan peraturan perundang- undangan berdasarkan Undang-undang ini.

91

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 2994, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

92

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

93